

**RENCANA STRATEGI BISNIS  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
(RSB P2M)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
2016-2020**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2016**

## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah Kami Panjatkan atas Rahmat dan Karunia yang dilimpahkan Allah SWT karena telah berhasil menyusun Rencana Strategi Bisnis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (RSB-P2M UNS) Tahun 2016-2020. RSB-P2M UNS ini disusun berdasarkan visi UNS yakni menjadi lembaga yang unggul, terpercaya dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan IPTEKS dan kebudayaan, selanjutnya dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan.

Proses penyusunan RSB-P2M UNS Tahun 2016-2020 melalui tahapan yang panjang dan menggunakan metode partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder, yang didahului dengan perencanaan awal yakni melakukan self evaluation untuk mengetahui existing condition kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman melalui analisis strength, weakness, opportunity, threat (SWOT/KKPA) yang dimiliki dan dihadapi LPPM UNS. Hasil analisis SWOT tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan RSB, yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan pencapaiannya.

Penyusunan RSB-P2M UNS Tahun 2016-2020 mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pendidikan tinggi meliputi UUD 1945: Ps 31 (5), UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 18 Tahun 2002, PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 66 Tahun 2010, Surat Keputusan MenKeu Nomor 52/KMK.05/2009, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 12 Tahun 2012, PerMen Dikbud RI Nomor 49 Tahun 2014, yang disempurnakan dengan PerMen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015, PerMen Dikbud RI Nomor 82 Tahun 2014, PerMen Diknas Nomor 73 Tahun 2008 dan PerMen Dikbud RI Nomor 82 Tahun 2014.

Di samping itu, penyusunan RSB-P2M UNS Tahun 2016-2020 juga mengacu pada Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Impelementasi standar nasional kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diketahui dan diukur dari kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi aspek sumber daya yang dimiliki, aspek manajemen yang terkait proses, pelaksanaan maupun penilaian pengabdian kepada masyarakat, aspek luaran yang dihasilkan, serta revenue yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.

Berdasarkan data kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2015 yang telah diunggah di <http://simlitabmas.dikti.go.id/kinerja>, LPPM UNS telah menghasilkan luaran berupa 1137 publikasi berupa artikel ilmiah (283 artikel ilmiah di jurnal internasional, 65 artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan 789 artikel ilmiah di jurnal Nasional Tidak Terakreditasi), 90 buku ajar/teks, 13 hasil penelitian yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 37 luaran berupa rekayasa sosial, 38 luaran berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), 4 luaran berupa kebijakan, 7 luaran berupa desain, 1 luaran berupa karya seni, 4 luaran berupa prototype, dan 57 luaran berupa model

dan 825 peneliti sebagai pemakalah di forum ilmiah (310 pemakalah di forum internasional, 492 pemakalah di forum nasional dan 23 pemakalah di forum regional). Selain itu, LPPM UNS menyelenggarakan 24 event forum ilmiah yang mampu mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sumber daya berupa dosen peneliti aktif sebanyak 1848 orang, 22 peneliti asing, 411 staf pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian dan 382 unit fasilitas pendukung.

RSB-P2M UNS Tahun 2016-2020 memuat dan menyajikan bab Pendahuluan, Landasan Pengembangan Rencana Strategis Bisnis Pengabdian kepada Masyarakat UNS, Garis besar Pengembangan Rencana Strategis Bisnis Pengabdian kepada Masyarakat UNS serta Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat.

RSB-P2M UNS Tahun 2016-2020 disusun dengan tujuan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan civitas akademika UNS lebih terarah sehingga hasil atau produk-produk kegiatan pengabdian kepada masyarakat lebih berdaya guna bagi masyarakat, pemerintah maupun pihak industri. Selain itu, RSB dapat pula digunakan sebagai parameter bagi UNS dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim Penyusun

## KATA SAMBUTAN

Rencana Strategis Bisnis (RSB) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret merupakan rencana strategis pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengejawantahan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. RSB ini disusun sebagai arahan dan panduan bagi seluruh civitas akademika UNS yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Untuk itu, saya sebagai Pimpinan Universitas Sebelas Maret menyambut baik diterbitkannya sebuah Buku Pedoman yang berisikan Rencana Strategis Bisnis yang memberikan panduan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang patut menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Dengan harapan bahwa kegiatan pengabdian dan produk luarannya dapat membantu meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.

Menurut data kinerja peralihan dan jumlah dana pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM UNS dalam kurun waktu tiga tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2015 dana atau hibah pengabdian kepada masyarakat yang diatur dan dikelola LPPM UNS sebesar 8,5 Milyar Rupiah, mengalami penambahan sebanyak 3,7 Milyar rupiah bila dibandingkan dengan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2014.

Adapun produk atau luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan pada tahun 2015 sebanyak 148 buah meliputi 37 luaran berupa rekayasa sosial, 38 luaran berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), 4 luaran berupa kebijakan, 7 luaran berupa desain, 1 luaran berupa karya seni, 4 luaran berupa prototype dan 57 luaran berupa model.

Berdasarkan perkembangan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh pengabdian di lingkungan UNS didominasi oleh skema Ipteks bagi Masyarakat (IbM) mencapai hampir 90%. Selain IbM, para pengabdian di lingkungan UNS juga melaksanakan pengabdian pada skema Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE), Iptek bagi Produk Kreativitas dan Inovasi Kampus (IbKIK), Iptek bagi Kewirusahaan (IbK), Iptek bagi Produk Unggulan Daerah (IbPUD), Iptek bagi Produk Kreativitas dan Inovasi Kampus (IbKIK), HI-Link, dan KKN-PPM.

Tak lupa, Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Sebelas Maret tahun 2016 – 2020. Kami berharap bahwa keberadaan RSB ini dapat membawa laju bertambah pada kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian yang dilaksanakan LPPM UNS sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang unggul di tingkat Internasional berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional.

Surakarta, Oktober 2016



Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS  
Rektor Universitas Sebelas Maret

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
PRAKATA.....	ii
KATA SAMBUTAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Rencana Strategis Bisnis Pengabdian Pada Masyarakat (RSB-P2M) UNS.....	1
1.2. Masa Berlaku Pedoman Kebijakan RSB-P2M UNS .....	2
1.3. Alur Penyusunan RSB-P2M UNS.....	2
1.4. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Bisnis-P2M.....	5
BAB II. LANDASAN PENGEMBANGAN RSB-P2M UNS.....	6
2.1. Visi LPPM.....	6
2.2. Misi LPPM .....	6
2.3. Tujuan LPPM .....	7
2.4. Analisis Kondisi Saat Ini .....	7
2.5. Kondisi P2M.....	9
BAB III. GARIS BESAR RENCANA BISNIS P2M LPPM UNS .....	52
3.1. Tujuan .....	52
3.2. Sasaran.....	53
3.3. Strategi dan Kebijakan P2M LPPM UNS .....	53
3.4. Formulasi Strategi Pencapaian .....	57
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA P2M.....	64
4.1. Program P2M.....	64
4.2. Kegiatan P2M.....	64
4.3. Program PPM di Unit Kerja/Fakultas/Jurusan yang merupakan Turunan Renstra-PPM.....	73
4.4. Indikator Program Kegiatan P2M .....	99
BAB V. PENUTUP .....	100

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Indeks Posisi Kinerja Penelitian LPPM UNS .....	8
Tabel 2.2. Perkembangan P2M UNS 4 tahun terakhir berdasarkan skema pengabdian 10	
Tabel 2.3. Kinerja LPPM UNS dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir.....	13
Tabel 2.4. Kinerja peraih dan Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat dosen yang diterima oleh lembaga dalam 3 tahun terakhir.....	14
Tabel 2.5. Pengalaman LPPM UNS melaksanakan program P2M .....	15
Tabel 2.6. Capaian Rencana P2M Dalam 4 Tahun Terakhir .....	16
Tabel 2.7. Fungsi dan Tugas Pokok Personal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret .....	20
Tabel 2.8. Pusat Studi dan Unit di Lingkungan LPPM-UNS .....	25
Tabel 2.9. Daftar Kerjasama Periode 2013-2015 oleh Pusat Studi /Personal di LPPM-UNS .....	29
Tabel 2.10. Tingkat Pendidikan SDM di Universitas Sebelas Maret Surakarta.....	43
Tabel 2.11. Sarana Laboratorium Internal UNS.....	44
Tabel 2.12. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat dosen yang diterima oleh lembaga dalam 3 tahun terakhir.....	46
Tabel 2.13. Pilihan-pilihan Stratejik Pengembangan P2M UNS.....	49
Tabel 3.1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat*.....	55
Tabel 3.2. Indikator Capaian Rencana P2M Dalam 5 Tahun Terakhir .....	56
Tabel 3.3. Indikator Pengukur Capaian Sasaran Bidang Pengembangan KKN.....	57
Tabel 3.4. Strategi Pengembangan P2M UNS .....	59
Tabel 4.1. Program dan Jenis Kegiatan PPM Sinergistik berbasis Kebhinekaan Intelektual Kewilayahan.....	65
Tabel 4.2. Prioritas Bidang P2M Tata Kelola dan Pelayanan Publik .....	73
Tabel 4.3. Prioritas Bidang P2M Sosial Kemasyarakatan .....	79
Tabel 4.4. Prioritas Bidang P2M Ekonomi dan Pembangunan Daerah .....	86
Tabel 4.5. Prioritas Bidang P2M Inovasi dan Pengembangan Iptek.....	92
Tabel 4.6. Indikator Sasaran P2M Dan Capaian Tahun 2015-2021.....	99

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Alur penyusunan Rencana Strategis Bisnis PPM UNS .....	4
Gambar 2.1. Posisi kinerja penelitian dan pengabdian LPPM UNS (2015).....	8
Gambar 2.2. Diagram Rekapitulasi Jumlah Kegiatan P2M UNS.....	10
Gambar 2.3. Diagram Rekap P2M per Bidang Ilmu 4 Tahun Terakhir .....	11
Gambar 2.4. Diagram Perkembangan dana P2M UNS berdasarkan sumber dana.....	11
Gambar 2.5. Struktur Organisasi LPPM-UNS.....	19
Gambar 2.6. Sumber Dana Kerjasama/Kemitraan.....	28
Gambar 2.7. Prosentase Kerjasama dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah.....	28
Gambar 3.1. Peta Strategis Pengembangan P2M LPPM UNS .....	54
Gambar 3.2. Periodisasi Strategi Pengembangan P2M LPPM UNS .....	58

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Rencana Strategis Bisnis Pengabdian Pada Masyarakat (RSB-P2M) UNS

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan dan penelitian sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian di perguruan tinggi diarahkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar tujuan dan standar pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi (UNS) dapat tercapai, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret menyusun **Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat** yang dituangkan dalam dokumen **Rencana Strategis Bisnis Pengabdian Pada Masyarakat (RSB-P2M)**.



## 1.2. Masa Berlaku Pedoman Kebijakan RSB-P2M UNS

Rencana Strategis Bisnis Pengabdian Pada Masyarakat (RSB-PPM) Universitas Sebelas Maret merupakan rencana strategis pengembangan pengabdian UNS untuk periode 2016-2021.

## 1.3. Alur Penyusunan RSB-P2M UNS

RSB-P2M disusun berdasarkan visi UNS yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal pengabdian masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan), isu global, nasional dan kewilayahan yang sedang dan akan terjadi. Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan strategi pengelolaan dan program pengembangan pengabdian dengan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terkait dengan **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang perlu ditempuh, beserta Indikator Kinerja Utama Pengabdian Kepada Masyarakat (IKU-P2M)**.

Untuk mewujudkan efektivitas, integrasi, dan sinergitas kegiatan pengembangan pengabdian di UNS, maka dibutuhkan adanya suatu strategi. Strategi dimaksud kemudian disajikan dalam bentuk roadmap yang merupakan pijakan dari ragam bentuk aktivitas untuk mencapai tataran peningkatan kualitas dan internasionalisasi UNS. Tema pokok pengabdian UNS untuk kurun masa 2015 hingga 2030 adalah penguatan keunggulan lokal untuk kejayaan domestik dan penguatan dampak global (*from local ional excellences to domestic and global impact*). Isu global adalah disepakati adanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), isu nasional adalah pengembangan Poros Maritim, Pembangunan Desa, Desa Perbatasan, Swasembada lima komoditas yaitu beras, jagung, kedele, gula dan daging. Selain itu juga adanya isu reformasi mental dan budaya. Dengan folus pada isu kewilayahan di Jawa Tengah adalah membangun desa mandiri dengan mengacu pada RPJM Provinsi Jawa Tengah dan Unggulan UNS dibidang Ketahanan dan Keamanan Pangan, Energi baru dan terbarukan serta keanekaragaman hayati.

Bidang kajian (*comfort area*) yang menjadi domain ranah kreatif yang dirancang oleh UNS yang ditujukan sebagai ruang berkreativitas dan inovasi para dosen dan

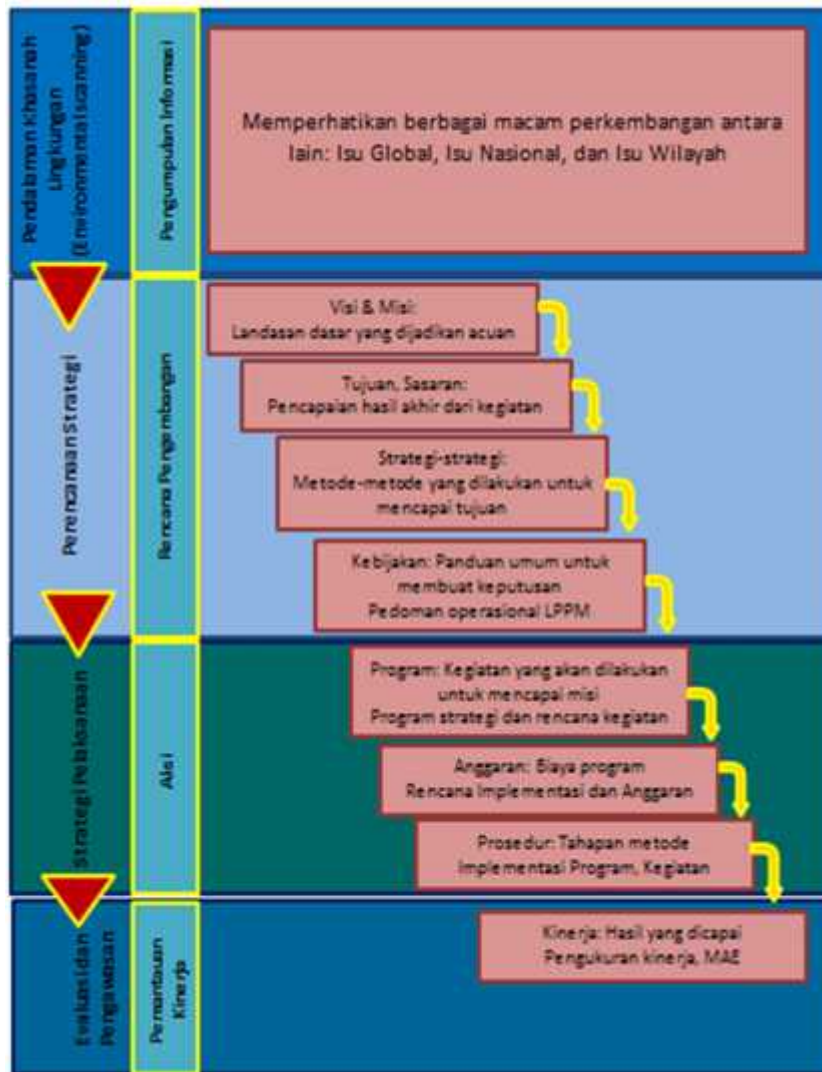
peneliti melalui *research group* masing-masing. Bidang kajian dalam ranah kreativitas dan inovasi itu mencakup 12 (dua belas) bidang kajian dalam skema strategis nasional, masing-masing dapat didekati dari perspektif *local wisdom*, kreasi dan atau terapan teknologi maju, penguatan ekonomi publik, dan *knowledge development* (pengabdian pada masyarakat, kuliah kerja nyata, dan pemberdayaan masyarakat).

Dalam rangka pengembangan pengabdian di UNS, maka disusun Rencana Strategis Pengabdian Pada Masyarakat unggulan UNS, dan rencana strategis pengembangan bidang ilmu. Setiap bidang ilmu merupakan suatu *research group* baik yang berada di pusat-pusat studi, laboratorium, fakultas, jurusan, bagian, dan program studi di lingkungan UNS. Penetapan pengabdian unggulan ini berdasarkan pada kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung serta rekam jejak (*track record*) penelitian dan pengabdian yang jelas dan berkesinambungan pada setiap *research group*.

Penyusunan RSB-P2M UNS disusun dengan metode partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholder* Universitas dengan memperhatikan berbagai macam perkembangan antara lain: memperhatikan **ISU GLOBAL** (Masyarakat Ekonomi Asean), **ISU NASIONAL** [Poros Maritim, Pembangunan Desa, Desa Perbatasan, Lima Komoditas Swasembada (Beras, Jagung, Kedele, Gula dan Sapi), Reformasi Budaya], dan **ISU WILAYAH** (Membangun Desa Mandiri : mandiri pangan, energi dan penanggulangan kemiskinan, buta aksara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah) Pemda Provinsi (Bappeda Propinsi) dan/atau Bappeda Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah dan diluar Jawa Tengah. Sebagaimana terlihat pada gambar di atas metode perencanaan diawali dengan melakukan *self evaluation* untuk mengetahui *existing condition* kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman melalui analisis *strength, weakness, opportunity, threat* (SWOT/KKPA) yang dimiliki dan dihadapi LPPM. Hasil analisis SWOT digunakan sebagai dasar penyusunan RSB, yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2016-2021 menggunakan model alur kerja *office of quality improvement* (Gambar 1.1). Pada Gambar 1.1. Rencana Strategi Bisnis LPPM 2016-2021 dijalankan melalui penyusunan program, kegiatan, anggaran dan kerangka implementasi (sinkronisasi koordinasi, dan tata kelola; distribusi urusan berdasar kegiatan; sistem penjaminan mutu internal; dan mekanisme dan instrumen pemantauan/evaluasi). Hasil capaian rencana strategis bisnis dievaluasi

secara periodik untuk mengetahui kemajuannya. Keberhasilan program dapat diketahui berdasarkan pemenuhan target yang ditetapkan pada *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian indikator merupakan salah satu ukuran yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran.



**Gambar 1.1** Alur penyusunan Rencana Strategis Bisnis PPM UNS

#### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Bisnis-P2M**

Landasan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sebelas Maret adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945: Ps 31 (5) bahwa pemerintah memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, pengembangan dan Penerapan IPTEK
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang penetapan UNS sebagai Badan Layanan Umum Penuh
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586.
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769); yang disempurnakan dengan Peraturan Menti Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2010-2014
- k. Rencana Strategis Bisnis UNS Tahun 2011 – 2015
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNS.

## BAB II . LANDASAN PENGEMBANGAN RSB-P2M UNS

LPPM sebagai lembaga berbasis riset berkewajiban: (1) menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu yang dapat menjalankan sistem serta infrastruktur pembangunan nasional; (2) mengembangkan budaya riset dan menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang mampu menciptakan nilai tambah maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia; dan (3) mengelola informasi penelitian dan pengembangan IPTEKS, yang secara strategis diperlukan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, termasuk merancang program dan agenda riset dan melaksanakan manajemen program, mengelola hak perlindungan intelektual, mengelola pemasaran serta penyebarluasan teknologi dan mengelola jaringan interaksi dengan berbagai pihak. Sejalan dengan arah pengembangan UNS dan tuntutan kontribusi UNS terhadap pembangunan bangsa di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta (LPPM–UNS) merumuskan visi, misi, tujuan, serta sasaran dan strategi pencapaian sebagai berikut:

### 2.1. Visi LPPM

Menjadikan lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan IPTEKS dan kebudayaan.

### 2.2. Misi LPPM

1. Meningkatkan dan mewujudkan jalinan kerjasama internal dan eksternal.
2. Mengembangkan dan mewujudkan produk-produk unggulan hasil penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat.
3. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan HKI untuk hasil penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat dalam rangka perlindungan HKI.
4. Meningkatkan kemandirian lembaga dan pusat-pusat penelitian pemberdayaan pada masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan dan peran serta dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat.
6. Penciptaan *image building*.

### 2.3. Tujuan Program Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

Tujuan program pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan arah pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berbasis riset yang dilaksanakan oleh para peneliti dan pengabdian di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Tujuan program P2M di UNS. Hal ini selaras dengan Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
- d. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

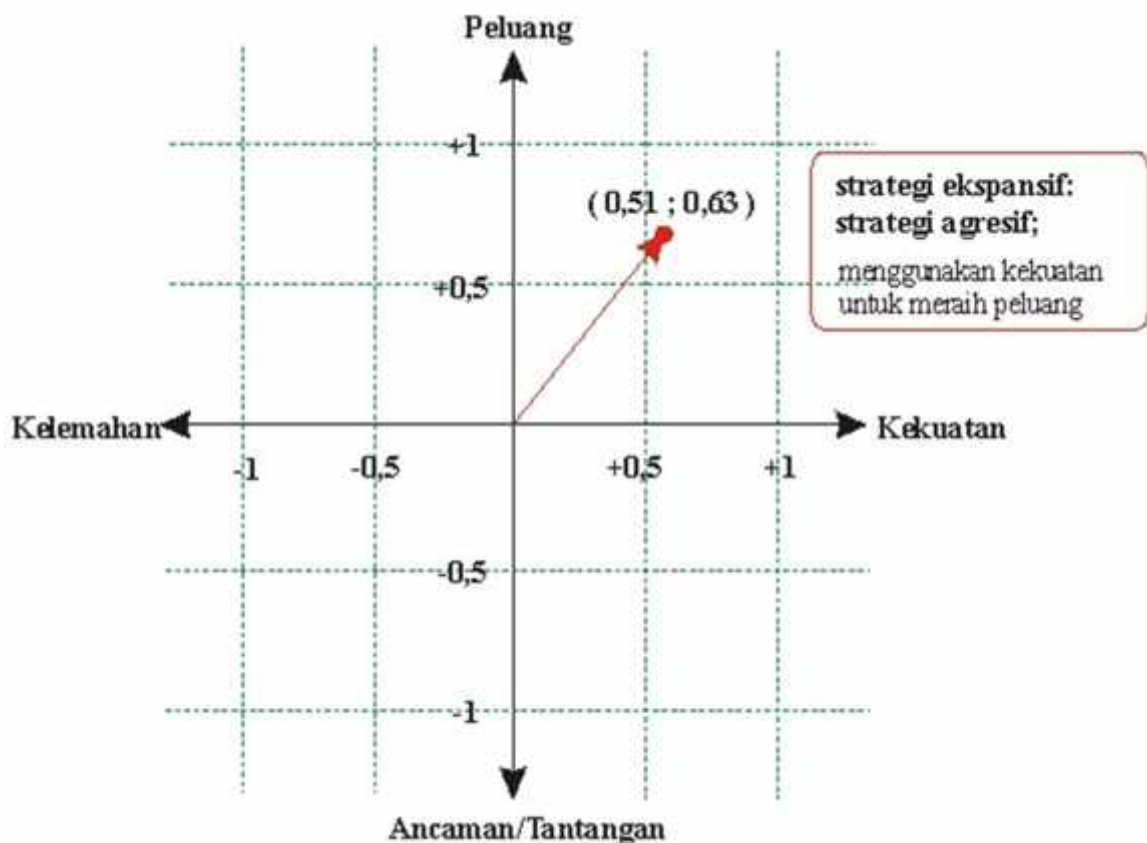
### 2.4. Analisis Kondisi Saat ini

Untuk mengetahui posisi kinerja saat ini LPPM UNS dan bagaimana strategi ke depan yang dapat dikembangkan, digunakan metode analisis SWOT. Setiap faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan diberi skor yang dikalikan dengan bobot berdasarkan tingkat penting tidaknya dan tingkat pengaruh faktor tersebut terhadap kinerja penelitian dan pengabdian di LPPM UNS. Jumlah seluruh nilai tersebut akan menjadi indeks posisi kinerja LPPM UNS dalam kuadran strategis dengan nilai koordinat diperoleh dari pengurangan nilai kekuatan dikurangi nilai kelemahan, dan nilai peluang dikurangi nilai ancaman/tantangan. Dengan membuat rekapitulasi sederhana dari semua faktor internal dan faktor eksternal, diperoleh nilai indeks posisi kinerja LPPM UNS seperti pada Tabel 2.1. Dari tabel ditunjukkan bahwa kekuatan LPPM UNS masih lebih besar daripada kelemahan dan peluang masih lebih besar daripada ancaman/tantangan.

**Tabel 2.1** Indeks Posisi Kinerja Penelitian LPPM UNS

Deskripsi evaluasi diri LPPM UNS		Nilai	Indeks posisi
<b>(A) - (B)</b>			
Analisis Faktor Internal			<b>0,51</b>
	Kekuatan LPPM UNS (A)	3,15	
	Kelemahan LPPM UNS (B)	2,64	
Analisis Faktor Eksternal			<b>0,63</b>
	Peluang LPPM UNS (A)	3,56	
	Ancaman/Tantangan LPPM UNS (B)	2,93	

Dengan menggunakan diagram *positioning* kita dapatkan gambaran bahwa posisi kinerja penelitian dan pengabdian LPPM UNS saat ini dapat dikatakan berada di Kuadran 1 (positif-positif). Dengan demikian strategi yang dipilih perlu mencerminkan penggunaan kekuatan secara maksimal untuk meraih peluang.



**Gambar 2.1** Posisi kinerja penelitian dan pengabdian LPPM UNS (2015)

Matriks SWOT di atas menjadi dasar bagi LPPM UNS untuk menentukan posisi bahwa saat ini LPPM UNS dan pilihan-pilihan strategis di bidang pengabdian antara lain:

1. Melakukan seleksi hasil kinerja lima tahun 2011-2015 guna dijadikan unggulan untuk dikembangkan dalam skala yang lebih luas di lima tahun ke depan berdasarkan roadmap pengembangan penelitian dan pengabdian jangka panjang.
2. Mengingat bahwa hasil SWOT menunjukkan bahwa posisi LPPM UNS memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan peluang, maka peningkatan peranan keluar UNS dalam memanfaatkan peluang yang tersedia perlu ditingkatkan secara lebih agresif, khususnya di bidang pengabdian.
3. Melakukan strategi ekspansi bidang pengabdian kepada masyarakat, untuk cakupan lokal, kewilayahan, nasional dan internasional secara bertahap dimulai dengan menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan di wilayah ASEAN
4. Melakukan ekspansi penggalan dana masyarakat dengan menjalankan kemitraan bisnis yang menunjang inti utama pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.

## **2.5. Kondisi P2M Saat ini**

### **2.5.1. Riwayat Perkembangan P2M UNS**

LPPM UNS Surakarta adalah singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta. LPPM UNS merupakan amalgamasi dari dua lembaga yang sudah ada, yaitu Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Penelitian (lemlit) UNS. LPPM UNS dibentuk berdasarkan SK Rektor UNS Nomor 649.A/j.27/KP/2004 Tanggal 30 Oktober 2004 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS. LPPM UNS terdiri atas 24 pusat studi. Diantaranya adalah Pusat Pengembangan kewirausahaan dan bioteknologi dan biodiversitas.

Riwayat perkembangan P2M di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tiga tahun terakhir berdasarkan 10 skema pengabdian yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM), memiliki perkembangan yang cukup relevan, prosentase diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:



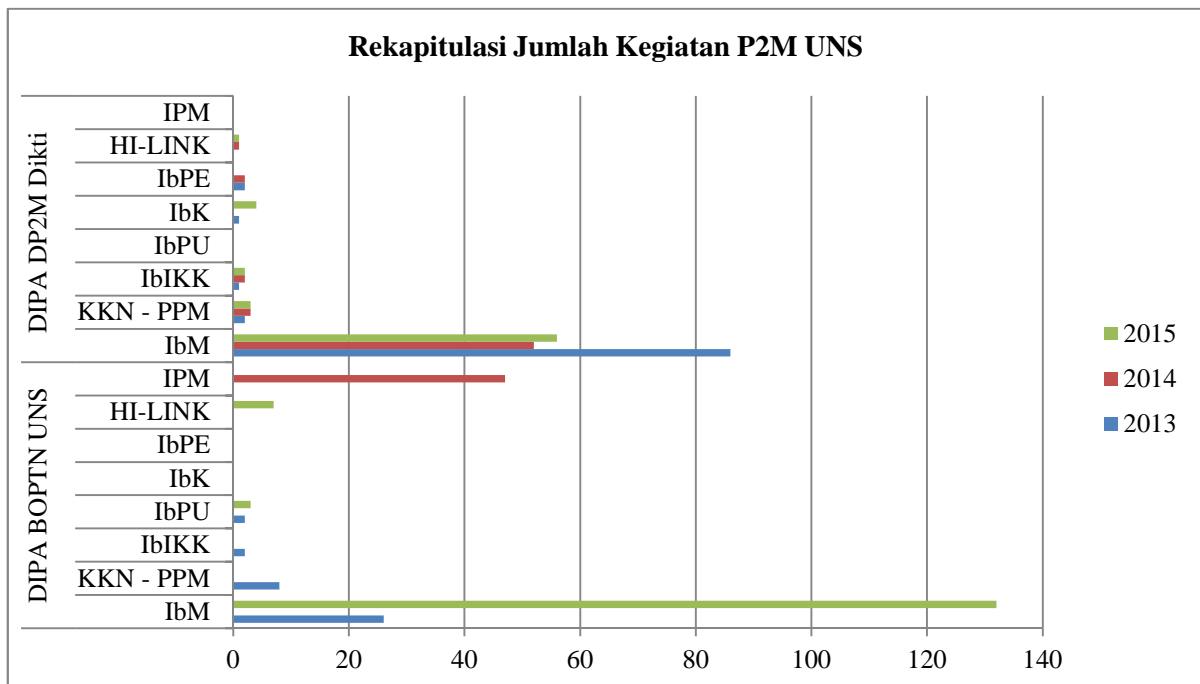
**Tabel 2.2** Perkembangan P2M UNS 4 tahun terakhir berdasarkan skema pengabdian

No	Skema Pengabdian	Tahun ke ...								Jumlah
		2013		2014		2015		2016		
		U	D	U	D	U	D	U	D	
1	Iptek Bagi Masyarakat (IbM)	224	112	139	52	413	188	174		1302
2	Iptek Bagi Kewirusahaan (IbK)	1	1	0	0	0	0			2
3	Iptek Bagi Produk Ekspor (IbPE)	7	2	3	2	4	4	7		29
4	Iptek Bagi Produk Unggulan Daerah (IbPUD)	4	2	0	0	6	3			15
5	Iptek Bagi Produk Kreativitas dan Inovasi Kampus (IbKIK)	14	9	3	2	15	9	7		59
6	Iptek Bagi Wilayah (IbW)	6	1	0	0	0	0			7
7	Iptek bagi Wilayah CSR (IbW-CSR)	0	0	0	0	0	0			0
8	Iptek Bagi Desa Mitra (IbDM)	0	0	0	0	0	0			0
9	Hi-Link	0	0	2	1	1	1			5
10	KKN-PPM	40	10	18	3	6	3			80
11	P2M Lanjutan	0	0	0	0	0	0	37		37

Keterangan: U = usulan, D = diterima

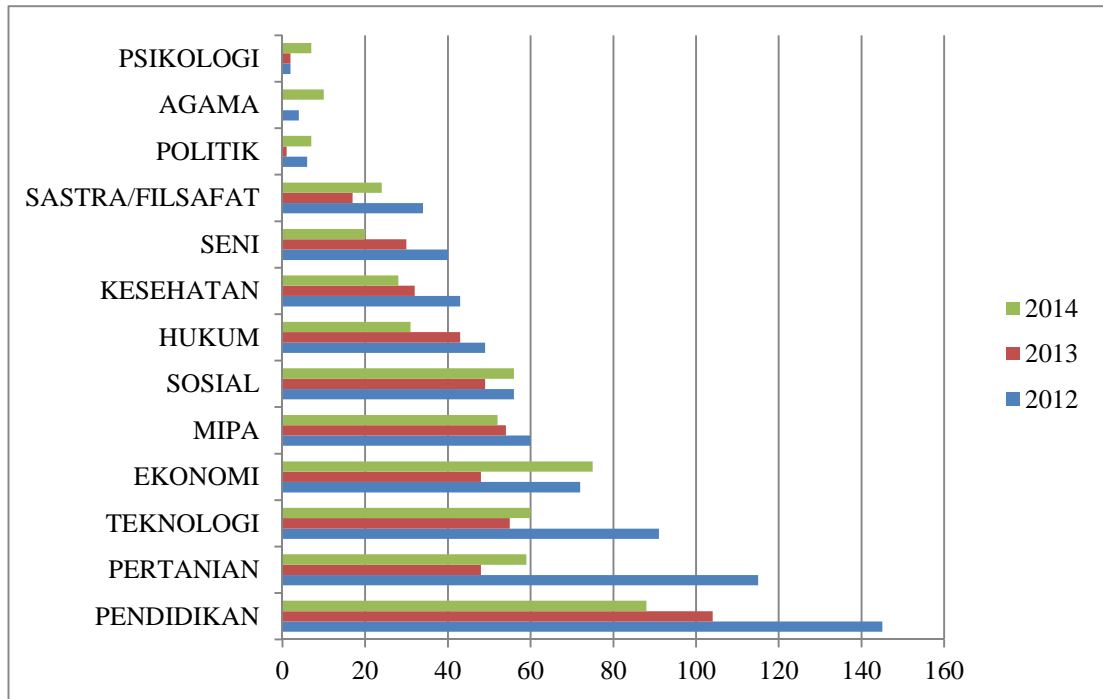
Sumber: Data dan informasi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013-2016

Pada Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa untuk 4 tahun terakhir perkembangan pengabdian yang dilakukan oleh dosen di UNS didominasi oleh skema pengabdian IbM, mencapai hampir 90%. Skema pengabdian UNS baik yang didanai oleh DIPA DP2M Dikti maupun DIPA BOPTN UNS pada rekapitulasi tahun 2013-2015 menunjukkan peningkatan yang disajikan pada Gambar 2.2.



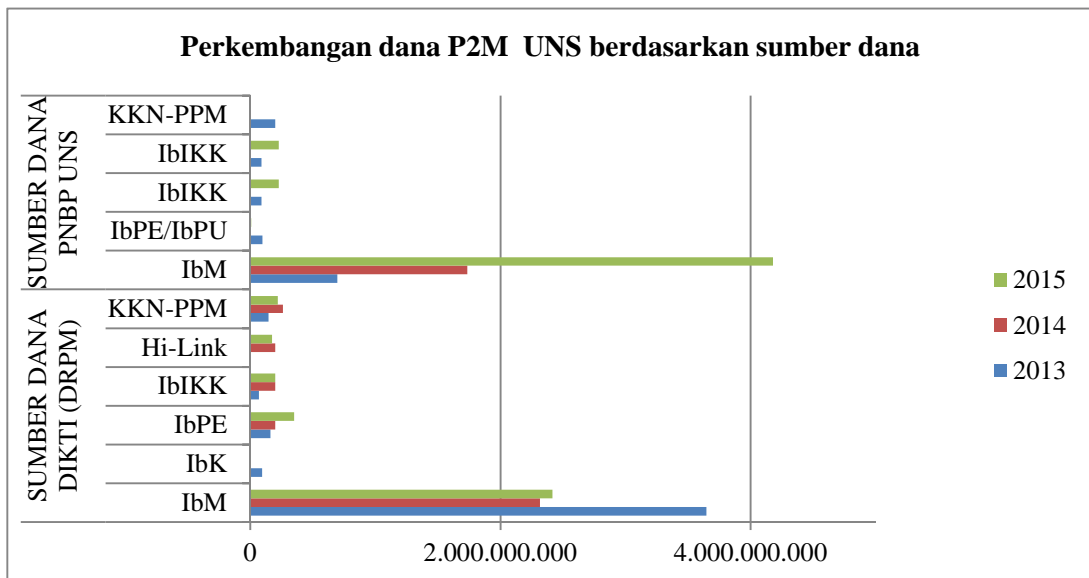
**Gambar 2.2** Diagram Rekapitulasi Jumlah Kegiatan P2M UNS

Ada tiga bidang ilmu yang memiliki potensi kinerja tinggi yaitu ilmu Pendidikan, Pertanian, dan Teknologi. Selain itu berdasarkan tema pengabdian distribusi dari luaran pengabdian pada empat (4) tahun terakhir berdasarkan tema pengabdian adalah sebagai disajikan pada Gambar 2.3.



**Gambar 2.3.** Diagram Rekap P2M per Bidang Ilmu 4 Tahun Terakhir

Selain itu berdasarkan sumber dana yang di raih selama tiga tahun juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan (Gambar 2.4.).



**Gambar 2.4.** Diagram Perkembangan dana P2M UNS berdasarkan sumber dana

Hingga saat ini LPPM UNS telah banyak menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para UKM maupun Kelompok Masyarakat. Kinerja LPPM UNS, khususnya pengabdian dalam bidang kewirausahaan dan penerapan Iptek ke masyarakat dalam 3 (tiga) tahun terakhir, adalah sebagai berikut Tabel 2.3 – 2.4. Kinerja LPPM UNS pada bidang pengabdian (2013-2015).

**Tabel 2.3.** Kinerja LPPM UNS dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir

No	Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat	2013				Jumlah dosen yang terlibat*	2014				Jumlah dosen yang terlibat*	2015				Jumlah dosen yang terlibat*
		Jumlah proposal (judul)		Didanai TA			Jumlah proposal (judul)		Didanai TA			Jumlah proposal (judul)		Didanai TA		
		Diusulkan utk didanai TA 2013		2013			Diusulkan utk didanai TA 2014		2014			Diusulkan utk didanai TA 2015		2015		
		Baru	Lanj.	baru	Lanj		baru	lanj	baru	lanj		baru	lanj	baru	lanj	
1	IbM	86	-	86	-	227	117	-	52	-	130	108	-	56	-	114
2	IbIKK	1	-	1	-	4	2	1	1	1	7	1	2	-	2	6
3	IbW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
4	IbW-CSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IbK	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	IbPE	2	-	2	-	9	4	-	3	-	7	2	2	2	2	10
7	Hi-Link	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	3
8	KKN-PPM	2	-	2	-	4	3	-	3	-	3	18	-	3	-	7
9																
Jumlah		92	-	92	-	248	128	1	60	1	148	133	5	61	5	140
Persentase proposal yang didanai**						47,27 %				47,82 %						
Persentase dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat yang didanai#		15,40 %				9,19 %				8,69 %						

\* Jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat yang didanai

\*\* (Jumlah proposal yang didanai : jumlah proposal yang diusulkan) x 100 %

# (Jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat yang didanai : jumlah dosen) x 100 %

**Tabel 2.4.** Kinerja peraihan dan Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat dosen yang diterima oleh lembaga dalam 3 tahun terakhir

No	Jenis Pengabdian Pada Masyarakat	2013		2014			2015			Jumlah (Rp)
		Dana pengabdian (Rp)		Dana pengabdian (Rp)			Dana pengabdian (Rp)			
		DIPA DP2M	Dana lainnya*	DIPA DP2M	DIPA PTN	Dana lainnya*	DIPA DP2M	DIPA PTN	Dana lainnya*	
1	IbM	3.647.500.000	--	-	2.316.000.000	--	2.415.500.000	--	--	8.379.000.000
2	IbIKK	70.000.000	--	-	200.000.000	--	200.000.000	--	--	470.000.000
3	IbW	-	--	-	-	--	-	--	--	-
4	IbW-CSR	-	--	-	-	--	-	--	--	-
5	IbK	95.000.000	--	-	-	--	-	--	--	95.000.000
6	IbPE	160.000.000	--	-	200.000.000	--	350.000.000	--	--	710.000.000
7	Hi-Link	-	--	200.000.000	-	--	175.000.000	--	--	375.000.000
8	KKN-PPM	145.000.000	--	260.000.000	--	--	219.500.000	--	--	624.500.000
9	Lainnya (sebutkan) Pengabdian dana PNBP UNS	--	1.083.750.000	--	--	1.734.000.000	--	--	5.261.213.286	8.078.963.286
Jumlah (Rp)		4.117.500.000	1.083.750.000	460.000.000	2.716.000.000	1.734.000.000	3.360.000.000		5.261.213.286	18.732.463.286

\*Termasuk dana dari internal Perguruan Tinggi (PNBP/dana masyarakat), instansi pemerintah, swasta, luar negeri

Universitas Sebelas Maret mempunyai 10 fakultas, Program Pasca Sarjana, dan Diploma; telah berkembang dengan unit-unit penunjang, antara lain: Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Perpustakaan, Pusat Komputer, Laboratorium Pusat dan Unit Pengembangan Bahasa. Untuk mendukung kegiatan P2M, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sebelas Maret telah banyak melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan Pemda atau Intansi lain, antara lain :

**Tabel 2.5.** Pengalaman LPPM UNS melaksanakan program P2M

No.	Judul Kegiatan	Jenis Kegiatan	Sumber Dana
1.	Incubator Wirausaha Baru INWUB di (Universitas Sebelas Maret )Surakarta	INWUB	DIKTI
2.	Pengembangan Produk Formulasi Tempe (Chip Tempe, Tortelo Tempe) sebagai Komoditi Ekspor Non Migas	VMY Non Migas	DIKTI
3.	Identifikasi dan Kebijakan Pemanfaatan Potensi Daerah yang Menunjang Pengembangan Sumber-sumber Pembeayaan Daerah Kabupaten Sragen	Kemitraan	Kabupaten Sragen
4.	Identifikasi dan Kebijakan Pemanfaatan Potensi Daerah yang Menunjang Pengembangan Sumber-sumber Pembeayaan Daerah Kabupaten Karanganyar	Kemitraan	Kabupaten Karanganyar
5.	Identifikasi dan Kebijakan Pemanfaatan Potensi Daerah yang Menunjang Pengembangan Sumber-sumber Pembeayaan Daerah Kota Surakarta	Kemitraan	Kota Surakarta
6.	Identifikasi dan Kebijakan Pemanfaatan Potensi Daerah yang Menunjang Pengembangan Sumber-sumber Pembeayaan Daerah Kabupaten Klaten	Kemitraan	Kabupaten Klaten
7.	Pelatihan Calon Pengusaha Kecil Menengah di Surakarta	Kemitraan	Pemda Tingkat I
8.	Penerapan Ketrampilan Teknik untuk Pengembangan Kerajinan Limbah Kayu Jati Bagi Masyarakat Sekitar Hutan Banjarejo Kabupaten Ngawi Jawa Timur	VMY	DIKTI
9.	Pengembangan Potensi Sumber PAD Kabupaten Sragen	Kemitraan	Dipenda Kab. Sragen
10.	Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemasaran UKM Pengrajin Mebel di Surakarta	Kemitraan	Deperindag RI TATP
11.	Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Keuangan Bagi Eksekutif dan DPRD Kota Surakarta	Kemitraan	UMA Surakarta
12.	Pengembangan Industri Kerajinan Kodya Blora	Semi Que III	DIKTI
13.	Pengembangan Agrobisnis Garut di Kabupaten Sragen	Semi Que III	DIKTI
14.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Industri Kecil Berbahan Baku Wijen	Semi Que III	DIKTI

No.	Judul Kegiatan	Jenis Kegiatan	Sumber Dana
15.	Pengembangan Design dan Kemasan Kerajinan Kayu di Blora	IPTEKDA LIPI	DIKTI
16.	Perintisan Teledukasi	Kerjasama	Indonesia Bangkit
17.	Perintisan Puspa Iptek (Peralatan)	Kerjasama	Mennristek RI
18.	Asistensi Konsultasi Pelatihan Kredit	Kemitraan	BI
19.	Pengembangan Sentra (BDS) a. Bulakan, Sukoharjo, Jawa Tengah b. Mantingan, Ngawi, Jawa Timur	Kemitraan	BPS KPKM RI
20.	Pengembangan Institusi Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro dan Kecil	Kemitraan	BPS KPKM RI
21.	Pengembangan Model Perkaderan SDM di Kalangan Wanita dan Pemuda Dalam Pengembangan UKMK	Kemitraan	BPS KPKM RI
22.	Sistem Pengendalian Intern UKM/LKM	Kemitraan	ACG Consult.
23.	Temu Dagang Internasional	Kemitraan	ACG Consult.

### 2.5.2. Capaian Rencana P2M UNS

Capaian rencana yang telah dicapai dalam kurun waktu tiga (3) tahun yaitu pada kurun waktu 2013 – 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.6.** Capaian Rencana P2M Dalam 4 Tahun Terakhir

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				Jumlah
			2013	2014	2015	2016	
1	Publikasi Ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat	Jurnal, koran dll	60	46	75		181
2	Pengabdian Kepada Masyarakat	IbM	112	52	188		352
		IbK	1	0	0		1
		IbPE	2	2	4		8
		IbPUD	2	0	3		7
		IbKIK	9	2	9		20
		IbW	1	0	0		1
		IbW-CSR	0	0	0		0
		IbDM	0	0	0		0
		Hi-link	0	1	1		2
		KKN-PPM	10	3	3		16
3	Sebagai pemakalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat		25	50	75		150
4	Teknologi Tepat Guna		5	7	9		21
5	HKI		9	9	13		31
6	Model/Prototype/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial		38	40	148		226
7	Buku Ajar (ISBN)		108	38	90		236

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				Jumlah
			2013	2014	2015	2016	
8	Jumlah Dana Kerjasama P2M	Internal UNS	1,2 M	2,8 M	4,3 M		8,3 M
		Nasional	4,25 M	1,25M	3,4 M		8,9 M
		Lain-lian (Pemda, Industra, UKM) CSR,	0,5 M	1,8 M	1,3 M		3,6 M
9	Unit Bisnis hasil penelitian		7	14	21		42
10	Kontrak kerja P2M		57	83	67		207
11	Jumlah Mitra kegiatan P2M		137	60	108		305
11	Angka partisipasi dosen dalam P2M *)		15%	9%	9%		33%
12	Persentase proposal yang didanai		45,2%	47,27%	47,82%		47,5%
13	Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen		1:6	1:6	1:6		1:6
14	Jumlah pengabdian unggulan Pusat Studi		1	2	2		5
15	Jumlah kegiatan pelatihan yang dikelola Pusat tiap tahun		2	4	4		10

Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa prosentase angka partisipasi dosen dalam kegiatan P2M masih rendah demikian juga publikasi hasil P2M dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta masih sangat minim sekali. Sebagian besar penelitian dan pengabdian dosen masih dalam bentuk laporan.

### 2.5.3. Program Dasar

Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan program dasar sebagai berikut.

1. Peningkatan produktivitas dan kualitas kegiatan P2M.
2. Peningkatan kapabilitas peraih HKI dan atau paten
3. Pembangunan kemitraan dan kolaborasi efektif dengan mitra
4. Rencana Strategis Bisnis (RSB)-P2M merupakan jabaran dari Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang (RSB-JP) Universitas Sebelas Maret 2011-2031 dalam rencana operasional tahunan dengan siklus 4 (empat) tahunan.

### 2.5.4. Kebijakan dan Program Utama

Untuk menunjang program dasar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan kebijakan dan program utama P2M sebagai berikut:



1. Kebijakan untuk mencapai produktivitas dan kualitas:
  - a. Pengembangan roadmap P2M, berbasis isu kewilayahan
  - b. Insentif P2M kompetitif UNS.
  - c. Peningkatan kompetensi P2M dalam publikasi dan desiminasi.
  - d. Peningkatan kompetensi P2M dalam meraih dana kegiatan.
  - e. Pembangunan jejaring P2M internal dan eksternal UNS.
2. Kebijakan untuk peraihan HKI dan atau paten:
  - a. Peningkatan kompetensi staf akademik dan mahasiswa untuk menghasilkan inovasi dan barang ciptaan.
  - b. Insentif desain dan inovasi unggulan UNS.
  - c. Peningkatan kompetensi paten drafting, HKI, dan desain industri berbasis inovasi dan budaya lokal.
3. Kebijakan untuk memperluas kemitraan dan kolaborasi yang efektif:
  - a. Pembangunan kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan inovasi/keunggulan UNS.
  - b. Pengembangan *revenue generating unit* terpadu dalam pemasaran inovasi/keunggulan UNS.

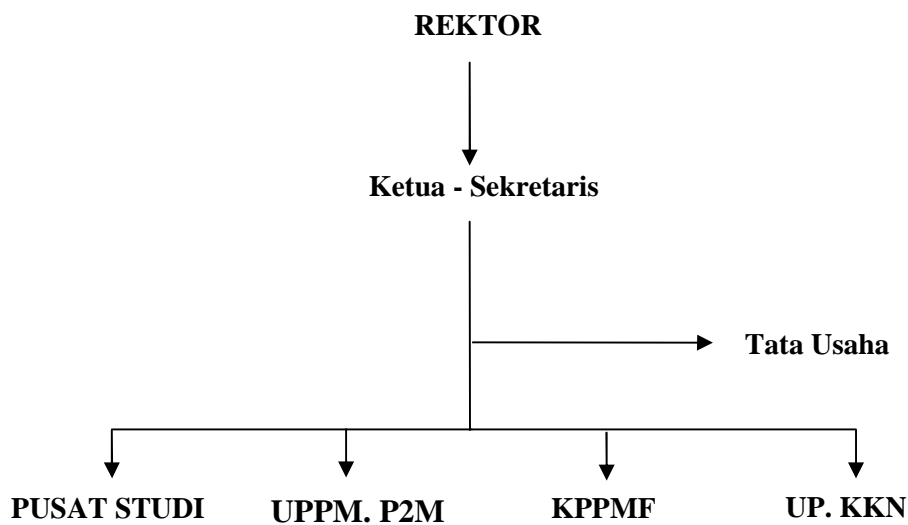
#### **2.5.5. Layanan Dasar dan Pengembangan**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret menjalankan aktivitas tridharma secara konsisten dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan :

1. Layanan penelitian, pengembangandan difusi hasil riset IPTEK dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan skema edukasi dan desiminasi hasil penelitian dalam bentuk kegiatan pelatihan, seminar, *workshop*, dan lokakarya.
3. Pengembangan kekuatan dan potensi ekonomi melalui layanan pemberdayaan Kelompok Binaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
4. Layanan perolehan dan pengelolaan HKI.
5. Layanan pusat teknologi informasi dan analisis data statistik.

### 2.5.6. Struktur Organisasi

LPPM bertanggung jawab kepada Rektor, yang pelaksanaan sehari-harinya berada di bawah koordinasi Pembantu Rektor I Bidang Akademik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret pasal 92, LPPM terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Pusat Studi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di bawah ini adalah diagram struktur organisasi LPPM di Universitas Sebelas Maret



**Gambar 2.5** Struktur Organisasi LPPM-UNS

Adapun tugas pokok dan fungsi personalia dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7.** Fungsi dan Tugas Pokok Personalia Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret

No	Personalia	Fungsi	Tugas Pokok
1)	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja LPPM berdasarkan renstra UNS untuk mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan lembaga</li> <li>2. Mengendalikan, mengkoordinir, mengarahkan, melaksanakan pembinaan pusat studi dan unit terkait berdasarkan tugas dan fungsi agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi kegiatan penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memegang tanggung jawab tertinggi terhadap semua Jasa Pelayanan yang dihasilkan oleh LPPM UNS.</li> <li>2. Bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu LPPM UNS.</li> <li>3. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana kerja LPPM UNS dilaksanakan untuk mencapai sasaran mutu, dan sistem manajemen mutu tetap dilaksanakan sesuai dengan perubahan/perkembangan LPPM UNS.</li> </ol>
2)	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan manajemen kegiatan kerjasama dan investasi</li> <li>2. Memimpin pelaksanaan tata kerja di LPPM UNS</li> <li>3. Memimpin kontrol kualitas dan pengembangan SDM</li> <li>4. Melaksanakan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>	Bertanggung jawab atas manajemen kegiatan kerjasama dan investasi, memimpin kontrol kualitas dan mengembangkan Sumber Daya Manusia di lingkungan LPPM UNS.
3)	Tata Usaha		
	a. Kepala Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program kerja Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan di lingkungan Bagian Tata Usaha untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai;</li> <li>3. Melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran lembaga;</li> <li>4. Mengumpulkan dan mengolah data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. Melaksanakan layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol>	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja Bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan, keuangan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Melaksanakan pengolahan luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan BMN di lingkungan lembaga;</li> <li>9. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Kerjasama; Sub Bagian Data dan Informasi; serta Sub Bagian Umum untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;</li> <li>10. Menyusun laporan Bagian Tata Usaha sesuai dengan basil kerja yang telah dicapal sebagai</li> </ol>	
	b. Kasubbag. Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan di lingkungan Sub Bagian Umum untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai;</li> <li>3. Melaksanakan urusan keuangan lembaga;</li> <li>4. Melaksanakan urusan kepegawaian lembaga;</li> <li>5. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan lembaga;</li> <li>6. Melaksanakan urusan pengelolaan BMN lembaga;</li> <li>7. Melaksanakan urusan ketatausahaan lembaga;</li> <li>8. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lembaga;</li> <li>9. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;</li> <li>10. Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Umum sesuai dengan hasil kerja yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</li> </ol>	Bertanggung jawab atas pengelolaan urusan keuangan lembaga, administrasi persuratan, perlengkapan, BMN lembaga, sumberdaya manusia, pengadaan dan keamanan serta ketertiban.

No	Personalia	Fungsi	Tugas Pokok
	c. Kasubbag. Data Informasi dan Kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program kerja Sub Bagian Data dan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan di lingkungan Sub Bagian Data dan Informasi untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai;</li> <li>3. Melaksanakan pengumpulan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Melaksanakan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Melaksanakan pelayanan data informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. Melaksanakan pengolahan luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Data dan Informasi untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;</li> <li>8. Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Data dan Informasi sesuai dengan hasil kerja yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</li> </ol>	Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan data dan informasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
	d. Kasubbag. Program dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program kerja Sub Bagian Program dan Kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan di lingkungan Sub Bagian Program dan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai;</li> <li>3. Melaksanakan penyusunan pedoman program kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Melaksanakan penyusunan anggaran kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Melaksanakan monitoring dan seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. Melaksanakan layanan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol>	Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan administrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, layanan kerjasama di bidang P2M, melakukan movev pelaksanaan kegiatan P3M, dan penyusunan panduan kegiatan P2M.

		<p>7. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Kerjasama untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;</p> <p>8. Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Program dan Kerjasama sesuai dengan hasil kerja yang telah dlcapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</p>	
4)	Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPMP2M)	Mengupayakan penjaminan mutu meliputi input, proses, output dan outcome penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen dan penjaminan mutu layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap para pemangku kepentingan.	Membantu Ketua dalam menjaga kualitas kegiatan maupun produk dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	a. Bidang Teknologi Tepat Guna dan Pengabdian kepada Masyarakat	Menjaga dan mengembangkan kualitas teknologi terapan atau teknologi tepat guna dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan dan mengembangkan kualitas serta melakukan pendokumentasian teknologi terapan dan kegiatan P2M
	b. Bidang Jurnal dan Bahan Ajar	Mendorong serta meningkatkan kuantitas dan kualitas produk P2M khususnya luaran publikasi jurnal dan bahan ajar/buku ajar.	Membantu tugas Ketua dalam pengembangan terealisasinya produk P2M dan pendokumentasian publikasi hasil riset di jurnal ilmiah dan produk bahan ajar/buku ajar.
	c. Bidang HaKI	Mendorong percepatan perolehan HaKI bagi para peneliti di UNS	Membantu tugas Ketua dalam percepatan, pendampingan, dan pendokumentasian perolehan HaKI oleh para dosen di lingkungan UNS
	d. Bidang Unit Bisnis Hasil Riset	Mendorong percepatan terbentuknya unit bisnis hasil riset di UNS	Membantu tugas Ketua dalam percepatan dan pendokumentasian unit bisnis hasil di lingkungan UNS

No	Personalia	Fungsi	Tugas Pokok
	e. Bidang Kontrak Kerja Kemitraan	Mendorong Grup Riset untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan instansi di luar UNS	Membantu tugas Ketua dalam percepatan, pendampingan, dan pendokumentasian kontrak kerja kemitraan dengan instansi di luar UNS
	f. Bidang Forum Ilmiah	Melakukan pendampingan penyelenggaraan forum ilmiah sebagai tindak lanjut dari hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan UNS	Membantu tugas Ketua dalam percepatan, pendampingan, dan pendokumentasian penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah di lingkungan UNS
	g. Bidang Pengembangan IT	Melakukan pengembangan IT khususnya sistem informasi pendukung kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat di UNS	Membantu tugas Ketua dalam pengembangan SI database penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS

### 2.5.7. Pusat Studi dan Unit Layanan di LPPM UNS

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret memiliki pusat-pusat studi dengan layanan unggulannya masing-masing. Adapun pusat-pusat studi yang ada di lingkungan UNS beserta layanan dan akreditasi berdasarkan kelayakan program, produktivitas, dan aksesibilitas setiap pusat studi pada tahun 2015 dapat dilihat secara terperinci pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.8.** Pusat Studi dan Unit di Lingkungan LPPM-UNS

No	Pusat Studi	Layanan Unggulan	Akreditasi
1.	Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu)	Pelatihan, konseling, pemagangan, dan pendampingan kewirausahaan UKM dan Mahasiswa, serta inkubator bisnis	A
2.	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)	Pendidikan dan pelatihan, konseling, penelitian, serta pendampingan pemecahan masalah di bidang lingkungan hidup berbasis DAS.	A
3.	Pusat Informasi dan Pusat Penelitian Kependudukan (PPK)	Penelitian, kajian bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, kesejahteraan keluarga, anak. LANSIA, dan kesehatan reproduksi	B
4.	Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW)	Konsultasi, pendampingan, penelitian dan kajian terkait pembangunan wilayah, perumahan permukiman, kemiskinan	A
5.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (PUSPARI)	Pengembangan, pelatihan, pengkajian, promosi di bidang kepariwisataan	B
6.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G)	Riset ilmiah maupun riset kebijakan terapan untuk mewujudkan kesetaraan- keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai bidang pembangunan.	A
7.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Biodiversitas (P3BB)	Identifikasi, analisis, pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, bioteknologi /biodiversitas, dan potensi flora, fauna, dan mikrobial pada suatu kawasan	A
8.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pangan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat (P4GKM)	Kajian, advokasi, pendidikan, pendampingan dan pengembangan dalam bidang pangan, gizi, TTG pengolahan hasil pertanian, dan kesehatan masyarakat	B
9.	Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDES-BANGDA)	Layanan, kajian, pengembangan di bidang pembangunan daerah dan pedesaan, potensi pengembangan sumber daya alam dan manusia, pertanian, kemiskinan dan pengembangan regional	B
10.	Pusat Kajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (P2KDK)	Pelatihan dan pendampingan di bidang <i>Legal Drafting</i> Peraturan Perundang-undangan dan Produk Kebijakan Daerah, RAPERDA, PERDA, keuangan daerah dan kegiatan penelitian terhadap masalah/isu aktual dan perkembangan demokrasi, pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, budaya serta materi lainnya yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan Otonomi Daerah.	A



No	Pusat Studi	Layanan Unggulan	Akreditasi
11.	Pusat Studi Difabilitas (PSD)	Layanan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, advokasi serta layanan pusat informasi tentang kajian rehabilitasi dan remediasi bagi masyarakat.	B
12.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM)	Penelitian dan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam rangka membangun kesadaran berkonstitusi dan pemenuhan serta perlindungan HAM bagi setiap warga negara atau masyarakat.	B
13.	Pusat Studi Bencana (PSB)	Penelitian dan pelatihan di bidang manajemen bencana, penyusunan dokumen dokumen penanggulangan dan pengurangan resiko bencana, penyusunan prosedur tetap (protap) dan simulasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.	C
14.	Pusat Studi Kesehatan Seksual (PSKS)	Penelitian, pengajaran, dan pengabdian di bidang kesehatan seksual, hukum dan sosial, dan budaya (poligami, poliandri, dan seksualitas lintas budaya, mitos-mitos seksual dalam masyarakat)	C
15.	Pusat Studi Keuangan Sektor Publik dan Tax Center	Pelatihan, konsultasi, dan pendampingan perpajakan, pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21, SPT PPN dan PPn BM	D
16.	Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)	Konsultasi dan kursus tentang akuntansi dan keuangan syariah, bisnis dan managemensyariah, pembuatan akta-akta ekonomi islam bagi notaris, hukum ekonomi dan keuangan syariah bagi advokad	C
17.	Pusat Studi Javanologi (Institut Javanologi)	Melakukan program pembelajaran kebudayaan Jawa melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan, riset, lokakarya/ workshop kebijakan pemerintah daerah pemangku kebudayaan, serta pembuatan modul pembelajaran budaya Jawa	A
18.	Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdem Tanas)	Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, konsultasi, penelitian, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang demokrasi dan ketahanan nasional	B
19.	Pusat Studi Pendampingan Koperasi dan UMKM (PSP-KUMKM)	Penelitian dan pendampingan perbaikan mutu manajemen dan produk, mengembangkan kerjasama dan kemitraan usaha KKUMKM, dan memperluas pasar.	B
20.	Pusat Studi Jepang (PSJ)	Menjadi pusat kajian dan penelitian kolaboratif di bidang ilmu sosial ekonomi, sastra, teknologi dan seni guna mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.	C
21.	Pusat Studi Bangsa-bangsa Melayu (PSBM)	Melakukan riset: untuk membuat Encyclopedia tentang Bangsa-bangsa Melayu, mengkaji tentang dialog westernisasi dengan tradisionalism, perubahan dan progresifitas bangsa-bangsa Melayu (studi komparatif), mengkaji sastra Melayu dan seni rupa klasik dan kontemporer.	D
22.	Pusat Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Pusdi PPP)	Melakukan penelitian dan kajian yang mendalam tentang kondisi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Usaha Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani dalam rangka fasilitasi pengembangan dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP).	B

No	Pusat Studi	Layanan Unggulan	Akreditasi Pusat Studi tahun 2014
23.	Pusat Kajian dan Pengembangan Teknologi dan Kolaborasi Industri (PKPTKI)	Melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian, konsultasi dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan sains dan teknologi untuk meningkatkan kualitas SDM	C
24.	Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO)	Melaksanakan riset, pengabdian, dan pendampingan guna tercapainya transparansi publik, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia	rintisan

#### Unit Layanan di LPPM UNS

No	Unit di LPPM	Layanan
1)	Unit Layanan dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (ULP. HKI)	Memberikan layanan HKI seperti: konsultasi HKI, masalah hukum HKI, dan pendampingan pendaftaran HKI
2)	Unit Pengelola Kuliah Kerja Nyata (UP. KKN)	Pusat penyelenggara Kuliah Kerja Nyata Tematik Integratif baik berbasis lokasi maupun berbasis kemitraan di lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta
3)	Unit Pengaduan dan Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM. P2M)	Mengupayakan penjaminan mutu meliputi input, proses, output dan outcome penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen dan penjaminan mutu layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap para pemangku kepentingan.

Sumber: Data dan informasi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015

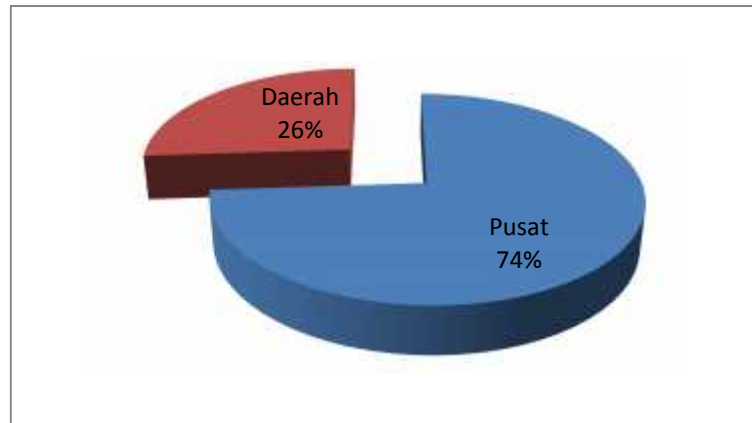
#### 2.5.8. Kemitraan yang Pernah/Sedang Terlaksana

LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta sudah lama dan banyak menjalin kemitraan atau kerjasama di bidang pengabdian baik dengan instansi pemerintah/ lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama periode 3 tahun terakhir, Gambar 2.6. memperlihatkan prosentase kategori kerjasama/kemitraan berdasarkan sumber dana yang dilakukan oleh pusat studi/pengabdian di lingkungan LPPM UNS. Untuk dana kemitraan yang bersumber dana luar negeri sejumlah 1%, sedangkan sumber dana dalam negeri 99%.



**Gambar 2.6.** Sumber Dana Kerjasama/Kemitraan

Gambar 2.6. menunjukkan kegiatan kemitraan pengabdian didominasi oleh kegiatan kerjasama yang bersumber dari dana Dalam Negeri (99%) yaitu pemerintah daerah 26% dan pemerintahan pusat 74%.



**Gambar 2.7.** Prosentase Kerjasama dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Tabel 2.9. merupakan daftar kerjasama atau kemitraan yang sudah dilaksanakan oleh Pusat Studi di LPPM-UNS maupun kerjasama secara personal sebagai dosen Universitas Sebelas Maret.

**Tabel 2.9.** Daftar Kerjasama Periode 2013-2015 oleh Pusat Studi / Personal di LPPM-UNS

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
1	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Karanganyar	Pendampingan Tim Ahli dalam Rangka Peningkatan Wewenang dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar	2013
2	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS Calon Purnabakti Pemerintah Kabupaten Demak	2013
3	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	Pengembangan Mobil Listrik Perguruan Tinggi	2013
4	Kantor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Wonogiri	Penyediaan Tenaga Ahli untuk Fasilitasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (IPTEKDA) Tahun 2013	2013
5	Kantor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Wonogiri	Penyediaan Tenaga Ahli untuk Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemberian Penghargaan Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Tahun 2014	2013
6	Kantor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Wonogiri	Penyediaan Tenaga Ahli untuk Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi Tahun 2013	2013
7	Kantor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Wonogiri	Penyediaan Tenaga Ahli untuk Fasilitasi riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2013	2013
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik & Legal Drafting Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2013
9	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia	Kerjasama Pekerjaan Swakelola Analisis Kebijakan Pentahapan dan Strategi Mencapai Universal Health Coverage BPJS	2013
10	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia	Kerjasama Pekerjaan Swakelola Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia	2013
11	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mojokerto	Pengadaan Jasa Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Bangunan Gedung	2013
12	Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	Pemberian Bantuan Sosial Penyusunan Soal/Materi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2013	2013

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
13	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia	Pekerjaan Swakelola Analisis Distribusi Raskin Tepat Jumlah	2013
14	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan bagi Perkebunan Tembakau, Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya Tahun 2013 Melalui Pendidikan dan Pelatihan tentang Upaya Pemulihan Kerusakan Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau dengan Teknologi Ramah Lingkungan	2013
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo	Kajian Faktor Pengungkit Daya Saing Kabupaten Purworejo dan Upaya Peningkatannya	2013
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo	Kajian Peluang Kerjasama Antar Wilayah Kabupaten Purworejo	2013
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2013
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan	2013
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Publik	2013
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	2013
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	2013
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2013
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	2013
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Biaya Transportasi Jamaah Haji di Kabupaten Bojonegoro	2013

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Grobogan	Kajian Tata Niaga dan Rantai Pasok Komoditas Hortikultura Utama	2013
26	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan	Ujicoba Penerapan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Accural di DPPKAD Kabupaten Grobogan	2013
27	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia	Pekerjaan Swakelola Kebijakan Pembangunan Kependudukan Menyikapi Datangnya Bonus Demografi	2013
28	Kabupaten Wonogiri	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri	2013
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan	MoU Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah	2013
30	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan 110 Tahun 2013	2013
31	Kabupaten Wonogiri	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2013	2013
32	Perusahaan Umum (Perum) Bulog	Analisis Indikator Kinerja Raskin Tahun Anggaran 2013	2013
33	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintah Bagi PNS yang Disesuaikan atau Inpassing Angkatan III Tahun 2013	2013
34	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintah Bagi PNS yang Disesuaikan atau Inpassing Angkatan IV Tahun 2013	2013
35	Balitbang dan Statistik Kabupaten Pacitan	Penelitian Pengembangan Inovasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Pacitan	2013
36	Balitbang dan Statistik Kabupaten Pacitan	Penelitian Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan	2013
37	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Orientasi Peranan Wanita dalam Pembangunan yang Berwawasan Kebangsaan Tahun 2013	2013
38	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 41 Tahun 2013	2013

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotabaru	Kajian Fiskal di Kabupaten Kotabaru	2013
40	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Pembekalan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi PNS Menjelang Masa Purna Tugas Tahun 2013	2013
41	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan 111 Tahun 2013	2013
42	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali	Penyelenggaraan Workshop Pembahasan Bedah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali	2013
43	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Kepemimpinan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 42 Tahun 2013	2013
44	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Pembekalan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi PNS Menjelang Masa Purna Tugas Tahun 2013	2013
45	Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri	Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri Tahun 2013	2013
46	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Sasaran Kerja Pegawai Angkatan III Tahun 2013	2013
47	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan 112 Tahun 2013	2013
48	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 43 Tahun 2013	2013
49	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggarakan Diklat, Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Disesuaikan atau Ipassing Angkatan V Tahun 2013	2013
50	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Disesuaikan atau Inpassing Angkatan VI Tahun 2013	2013
51	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Sasaran Kerja Pegawai Angkatan IV Tahun 2013	2013
52	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Orientasi Peranan Wanita yang Berwawasan Kebangsaan PIM III Angkatan 111 Tahun 2013	2013

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
53	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Pendataan Obyek Pajak Tahun 2013	2013
54	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Analisa Kebutuhan Diklat	2013
55	Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Pemberian Bantuan Dana Riset Pembangunan Indonesia Terkait Fabrikasi Battery Li-ION Berbasis LiFePO4 Nano Partikel untuk Aplikasi Mobil Listrik Nasional	2013
56	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta	Penyelenggaraan Diklat, Diklat Orientasi Peranan Wanita yang Berwawasan Kebangsaan PIM III Angkatan 112 Tahun 2013	2013
57	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Hibah Dukungan Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Lab. Herbal Tahun Anggaran 2013	2013
58	Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik dan Legal Drafting Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	2014
59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta	Tenaga Ahli sebagai Narasumber Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2015	2014
60	PT. Pertamina (Persero)	Konsultan Design Perancangan / Desain Security Access, Security Gate, Security Monitor dan HSE Point di Pintu 1, Pintu 3, Pintu 8 Area 70 dan Pintu 11 Area New Plant PT Pertamina RU IV Cilacap	2014
61	Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar	Pendampingan Tim Ahli Dalam Rangka Peningkatan Wewenang dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	2014
62	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan	Penyesunan Raperda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2014
63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo	Analisis Resiko Bencana Berdasarkan Data Kebencanaan dan Peta Rawan Bencana di Kabupaten Ponorogo	2014
64	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi PNS Calon Purnabakti Pemerintah Kabupaten Demak	2014



No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo	Penyusunan Model dan Strategi Pengembangan dan Pelestarian Reyog di Kabupaten Ponorogo	2014
66	Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik dan Legal Drafting Ranperda tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan	2014
67	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ngawi	Kajian Penghitungan Potensi Peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi	2014
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi Pengawasan dan Pembinaan Masyarakat yang Berpotensi Bencana	2014
69	Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan	Diklat Standar Uji Ahli Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan	2014
70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo	Sosialisasi dan Publikasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ponorogo	2014
71	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan	Validasi Aset Tanah Jalan Kabupaten Grobogan	2014
72	Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	2014
73	Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magetan	Inventarisasi dan Identifikasi Keanekaragaman Hayati di Kecamatan Poncol dan Parang Kabupaten Magetan	2014
74	Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magetan	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Tahun 2014 Melalui Pendidikan dan Pelatihan tentang Upaya Pemulihan Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau dengan Teknologi Ramah Lingkungan	2014
75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo	Sistem Informasi Profil Daerah	2014
76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo	Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Desa Wisata Kabupaten Ponorogo	2014

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo	Strategi dan Kebijakan Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah	2014
78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ponorogo	2014
79	Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar Kemendikbud	Penyusunan Soal/Materi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2014	2014
80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo	Sistem Informasi Manajemen Jamkesmas dan Jamkesda dalam Mendukung Updating Data di Kabupaten Ponorogo	2014
81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo	Penyusunan Database Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Negeri (SD, SLTP dan SLTA) dalam rangka Mendukung Percepatan Pelaksanaan DAK di Kabupaten Ponorogo	2014
82	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu	Pemberian Bantuan Dana Riset Pembangunan Indonesia terkait Produksi Zat Warna Alami Berwawasan Lingkungan untuk Aplikasi Green Art dan Green Energy	2014
83	CV. Harsari, AMT. Kabupaten Magetan Jawa Timur	Penyusunan Naskah Akademik Implementasi Sistem Rasionalisasi PJU dengan Pola Kerjasama ESCO Shared Saving Performance Contract (Unsolicited Project) yang Dilakukan di 4 (empat) Pemerintah Kabupaten (Pemda)	2014
84	Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan	Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Irigasi	2014
85	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Izin Perusahaan Industri	2014
86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo	Pembuatan Peta Micro Zonasi Gempa Bumi di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Data Percepatan Tanah Maksimum Sebagai Upaya Pemetaan Daerah Rawan Gempa Bumi Skala Kabupaten di Kabupaten Ponorogo	2014
87	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI	Kebijakan Pengelolaan Urbanisasi Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan	2014
88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung	Fasilitasi Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Temanggung	2014

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
89	Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data Kajian	2014
90	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu	Pemberian Bantuan Dana Riset Mobil Listrik Nasional	2014
91	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi	Kerjasama Bidang Penelitian	2014
92	Bappeda Kabupaten Kotabaru	Kajian Efisiensi dan Efektivitas Fiskal Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan SILPA	2014
93	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPTEKDALIPI) Tahun 2015	2015
94	Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar	Pendampingan Tim Ahli Dalam Rangka Peningkatan Wewenang dan Fungsi Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015	2015
95	Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali	Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, BinteK, Pembahasan Ranperda dan Kegiatan Lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Boyolali	2015
96	Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Surakarta	Tenaga Ahli Bidang Sosial Politik dalam rangka Penyusunan Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2016	2015
97	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Ngawi	Penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	2015
98	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Ngawi	Penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah	2015
99	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Ngawi	Kerjasama Bidang Penelitian : Kajian Indikator Penentu sebagai Upaya Perhitungan Proyeksi Potensi Pajak Daerah	2015
100	Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI	Pelaksanaan Pendaftaran, Ujian EPS-Topik dan Skill Test Tahun 2015 Sektor Manufaktur	2015
101	Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar Kemendikbud	Penyusunan Soal/Materi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2015	2015
102	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo	Pemeliharaan Peralatan Bencana dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo	2015

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
103	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Grobogan	Kegiatan Penyusunan Perbup tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2015
104	Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Kab. Boyolali	Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Jabatan	2015
105	Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara	Penyusunan Naskah Akademik dan Legal Drafting Ranperda tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	2015
106	Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Demak	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS Calon Purnabakti Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015	2015
107	Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik	2015
108	Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri	Fasilitasi Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pencermatan Atas Materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014	2015
109	PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Madiun	Pengelolaan dan Pendampingan dalam Penyaluran dan Penagihan Kredit Kemitraan kepada Usaha Kecil/Mitra Binaan	2015
110	Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	2015
111	Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Pariwisata	2015
112	Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Tata Kelola Sumur Tua	2015
113	Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro	Kegiatan Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	2015
114	Satker Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi	Pelaksanaan Insentif Riset Sinas	2015
115	Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	Penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik	2015

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
116	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo	2015
117	Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta	Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Accrual bagi PNS Kota Surakarta	2015
118	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar	Assesment Test Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2015
119	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ponorogo	Pemetaan Potensi Air Tanah dengan Menggunakan Metode Geo Listrik di Kabupaten Ponorogo Sebagai Antisipasi Bencana	2015
120	Koperasi Mahasiswa UNS	Pengadaan Atribut KKN Tahun 2015	2015
121	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pengembangan Model Integrasi Data dan Informasi Kependudukan (Kasus Permasalahan Kependudukan di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo)	2015
122	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian	Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik oleh Perguruan Tinggi Lokasi Desa Wonoagung Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri	2015
123	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian	Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik oleh Perguruan Tinggi Lokasi Desa Katapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang	2015
124	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu	Pengintegrasian Materi Ajar Berbasis Budaya Indonesia dengan Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Bahasa Asing Tingkat Dasar di Indonesia	2015
125	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Penelitian Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ngawi	2015
126	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Penelitian Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Ngawi	2015
127	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Penelitian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Ngawi	2015
128	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten	Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Belanja Jasa Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pekerjaan Seleksi Teknis Penyediaan Jasa Tenaga Non Medis, Jasa Medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupa	2015
129	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Awal Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)	2015

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
130	United State Agency of International Development's (USAID)	Privat Financing Advisory Network-Asia Project (the "PFAN-Asia Program)	2015
131	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Magetan	Review Masterplan Pengembangan Agropolitan	2015
132	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten	Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Belanja Jasa Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pekerjaan Seleksi Teknis Penyediaan Jasa Tenaga Non Medis, Jasa Medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten	2015
133	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penyusunan Naskah Kajian Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Efektifitas Pelaksanaan BOS dalam Menunjang Operasional SMK Rujukan)	2015
134	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penyusunan Naskah Kajian Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Pengembangan Mutu Proses Pembelajaran Dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar Siswa SMK Rujukan)	2015
135	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Awal Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Bantuan Hukum	2015
136	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Analisis Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas	2015
137	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia	2015
138	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Analisis Perbaikan Program Raskin : Alternatif Penggantian Kebijakan dengan Program Ketahanan Pangan Lainnya	2015
139	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 Melalui Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	2015
140	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 Melalui Bimbingan Teknis Penerapan Produksi Berwawasan Lingkungan	2015

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
141	Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bidang SMA dan SMK	2015
142	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi	Penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalulintas	2015
143	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi	Penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2015
144	Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta	Diklat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2015	2015
145	PT. Pertamina (Persero)	Penyelidikan Tanah (Soil Investigation) di TBBM Marketing Operation Region IV	2015
146	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magetan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magetan	2015
147	Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Kab. Klaten	Uji Kompetensi dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	2015
148	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Penelitian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Workshop Mobil Listrik Internasional Tahun 2015	2015
149	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar	Pendampingan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	2015
150	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar	Pendampingan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015 tentang Perlindungan Industri	2015
151	Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen	Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mewujudkan Desentralisasi Pendidikan di Daerah	2015
152	Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen	Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Pendidikan di Daerah	2015

No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
153	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Magetan Tahun 2015	2015
154	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2016	2015
155	Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen	Sosialisasi Pemetaan Kebutuhan Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	2015
156	Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di SKPD Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	2015
157	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo	Penyusunan Penjelasan/Keterangan Akademik Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	2015
158	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Purworejo	2015
159	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Purworejo	2015
160	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Taman Kota	2015
161	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Ijin Usaha Industri	2015
162	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2015
163	Badan Standardisasi Nasional	Penelitian dan Pengembangan di Bidang Standardisasi	2015
164	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magetan	Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral Wilayah Pertambangan di Kabupaten Magetan Tahun 2015	2015
165	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Pemanfaatan Limbah (Wirausaha Jamur dan Wirausaha Cacing)	2015
166	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	Pelatihan Pengembangan Kotoran Ternak dan Sampah Rumah Tangga untuk Energi Alternatif	2015



No	Daftar Instansi	Ruang Lingkup Kegiatan	Tahun
167	Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	Diklat Peningkatan Sumber Daya Manusia/Pendidikan/Pelatihan/Bimbingan Teknis, Penelitian/Kajian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya	2015
168	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar	Assesment Test Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2015
169	Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kota Surakarta	2015
170	Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga	Penyelenggaraan Pengiriman Peserta Pembekalan Pensiun Luar Daerah Tahun 2015	2015
171	Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga	Penyelenggaraan Pengiriman Peserta Pembekalan Pensiun Luar Daerah Angkatan II Tahun 2015	2015
172	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta	Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Kajian Potensi Pajak Daerah	2015
173	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta	Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Kajian Potensi Retribusi Daerah	2015
174	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penyusunan Draft Awal Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)	2015
175	Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI	Pembuatan Model dan Modul Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Desa Membangun	2015

## 2.5.9. Potensi LPPM UNS

### 2.5.9.1.Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada tingkat universitas sangat menentukan terhadap kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sumberdaya manusia di UNS terdiri atas tenaga edukatif dan tenaga administrasi. Sinergi antara tenaga edukatif dan tenaga administrasi akan sangat menentukan kualitas layanan serta kualitas hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi pengembangan IPTEK dan kesejahteraan masyarakat. Potensi SDM tenaga edukatif di UNS dapat dilihat pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10.** Tingkat Pendidikan SDM di Universitas Sebelas Maret Surakarta

No.	Fakultas	S3	S2	SP-2	SP-1	Profesi	S1	Total
1	Fakultas Seni Rupa dan Desain	6	42	0	0	0	5	53
2	Fakultas KIP	103	277	0	0	0	9	389
3	Fakultas Hukum	18	68	0	0	0	0	86
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	38	80	0	0	0	0	118
5	Fakultas Ilmu Sosial Politik	17	63	0	0	0	1	81
6	Fakultas Pertanian	58	93	0	0	0	0	151
7	Fakultas Kedokteran	40	82	3	28	13	2	168
8	Fakultas Teknik	43	140	0	0	0	10	193
9	Fakultas MIPA	49	81	0	0	0	0	130
10	Fakultas Ilmu Budaya	19	69	0	0	0	0	88
<b>JUMLAH</b>		<b>391</b>	<b>995</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>1457</b>
<b>Prosentase</b>		<b>26,84</b>	<b>68,29</b>	<b>0,21</b>	<b>1,92</b>	<b>0,89</b>	<b>1,85</b>	

Sumber: Data dan informasi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014

Berdasarkan Tabel 2.9. diketahui bahwa sebagian besar dosen UNS berlatar belakang pendidikan S2, yaitu sebanyak 69.73%. Sementara itu masih terdapat 2.4% berpendidikan S1. Sedangkan dosen berpendidikan S3 sebesar 24.48%. Meski lebih dari separuh dosen UNS sudah berpendidikan S2 dan beberapa diantaranya masih melanjutkan studi S3, namun komposisi pendidikan tersebut masih belum ideal, khususnya jika dibandingkan dengan visi renstra UNS yang pada tahun 2011 di mana dosen yang berpendidikan S1 diharapkan sudah berpendidikan S2 dan tahun 2015 merencanakan mempunyai doktor sebanyak 25 % dari total dosen.

### 2.5.10. Sarana Prasarana

Sarana laboratorium mitra LPPM UNS terbagi ke dalam 2 kelompok besar yakni laboratorium internal UNS dan laboratorium eksternal UNS.

- Laboratorium Internal UNS

Laboratorium ini berlokasi di dalam kampus, digunakan oleh tenaga pendidik UNS sebagai sara pendukung kegiatan P2M, sebagai berikut:

**Tabel 2.11.** Sarana Laboratorium Internal UNS

No	Nama Laboratorium	Jenis Alat
1.	Laboratorium F. Teknik	Material, energy, pengairan, manufaktur, mekanika tanah, ergonomic, dan arsitektur
2.	Laboratorium FMIPA	Microscopy, Spectroscopy, Structural Analysis, Metalurgical Analysis, Bio and Advanced Materials, Bio-Chemical, Biotechnology, Microbiologi, Akustik dan Geofisik
3.	Laboratorium Pertanian	Proses pengolahan pangan dan hasil pertanian, pangan dan gizi, komunikasi pertanian, manajemen usaha tani, ekonomi pertanian, sosek peternakan, nutrisi dan pakan ternak, produksi ternak, fisika, dan konservasi tanah, pedelogi dan survey tanah, kimia dan kesuburan tanah, biologi tanah, ekologi dan manajemen produksi tanaman, hama dan penyakit tanaman, fisio tumbuhan dan bioteknologi, dan pemuliaan tanaman
4.	Laboratorium FKIP	Teknik bangunan, teknik mesin, komputer, fisika, biologi dan kimia
5.	Laboratorium FISIP	Multimedia, administrasi Negara, sosiologi, komputer
6.	Laboratorium Fak. Hukum	Multimedia, Laboratorium Pengadilan Mini dan komputer
7.	Laboratorium F. Kedokteran	Biomedik, biomolekuler, parasit, patologi, anatomi
8.	Laboratorium F. Ekonomi	Laboratorium akuntansi, perbankan, ekspor-impor, dan pasar modal
9.	Laboratorium F. Sastra dan Seni Rupa	Bahasa, filologi, linguistik, ILC, studio radio, grafis, tour, sejarah, patung, dan studio photo

Sumber: *Data dan informasi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010*

- Laboratorium Eksternal UNS

Laboratorium ini berada di luar kampus UNS dan merupakan mitra kerja dari LPPM UNS. Laboratorium ini biasanya merupakan mitra kerjasama antara staf pengajar UNS dengan mitra industri dalam mengerjakan penelitian-penelitiannya. Laboratorium eksternal ini berupa Instansi Pemerintah (Puspipstek Serpong, BPPT); Pemda (Pemda se-Solo Raya, Magetan, Ngawi, Pacitan); BUMN (PT. INKA Madiun, PT. Dirgantara Indonesia Bandung, PTP Negara); Industri Besar (misalnya Industri Textil) dan UMKM (klaster-klaster industri se-wilayah eksKaresidenan Surakarta misalnya : industri batik, *shuttle cock*, tahu tempe, UKM pengecoran logam di Ceper Klaten, industri pengecoran kuningan di Pati, UKM pembuatan pupuk, peternakan, beberapa UKM di Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali dan Karanganyar).

### **2.5.11. Biaya**

Potensi dibidang penelitian dan pengabdian diukur baik oleh jumlah dosen yang terlibat dalam P2M maupun oleh perolehan hibah kompetitif dan Kerjasama. Penilaian terakhir tersebut menjadi salah satu potensi penting dalam mengukur kinerja P2M di Universitas Sebelas Maret. Perolehan ini menunjukkan kualitas daya saing dosen dan atau P2M di UNS di tingkat regional, nasional dan internasional.

**Tabel 2.12.** Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat dosen yang diterima oleh lembaga dalam 3 tahun terakhir

No	Jenis Pengabdian Pada Masyarakat	2013		2014			2015			Jumlah (Rp)
		Dana pengabdian (Rp)		Dana pengabdian (Rp)			Dana pengabdian (Rp)			
		DIPA DP2M	Dana lainnya*	DIPA DP2M	DIPA PTN	Dana lainnya*	DIPA DP2M	DIPA PTN	Dana lainnya*	
1	IbM	3.647.500.000	--	-	2.316.000.000	--	2.415.500.000	--	--	8.379.000.000
2	IbIKK	70.000.000	--	-	200.000.000	--	200.000.000	--	--	470.000.000
3	IbW	-	--	-	-	--	-	--	--	-
4	IbW-CSR	-	--	-	-	--	-	--	--	-
5	IbK	95.000.000	--	-	-	--	-	--	--	95.000.000
6	IbPE	160.000.000	--	-	200.000.000	--	350.000.000	--	--	710.000.000
7	Hi-Link	-	--	200.000.000	-	--	175.000.000	--	--	375.000.000
8	KKN-PPM	145.000.000	--	260.000.000	--	--	219.500.000	--	--	624.500.000
9	Lainnya (sebutkan) Pengabdian dana PNBPN UNS	--	<b>1.083.750.000</b>	--	--	<b>1.734.000.000</b>	--	--	<b>5.261.213.286</b>	<b>8.078.963.286</b>
Jumlah (Rp)		4.117.500.000	<b>1.083.750.000</b>	460.000.000	2.716.000.000	<b>1.734.000.000</b>	3.360.000.000		<b>5.261.213.286</b>	<b>18.732.463.286</b>

\*Termasuk dana dari internal Perguruan Tinggi (PNBP/dana masyarakat), instansi pemerintah, swasta, luar negeri

### 3. Infomasi dan Manajemen Organisasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan proposal maupun laporan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, LPPM UNS membuat sistem online yang diberi nama IRIS1103 (*Intelligent Research and Innovation Services 1103*) yang beralamat <http://iris1103.uns.ac.id>. Sistem ini dapat memberikan layanan kepada dosen baik sebagai peneliti maupun pengabdian dari segi pemasukan data proposal hingga laporan akhir dan luaran serta informasi-informasi penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang ada di UNS secara online dan terintegrasi. Peneliti dan pengabdian di lingkungan UNS juga dapat melihat perkembangan penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan dari manapun dan kapanpun, sehingga informasi yang ada dapat diakses dengan mudah. Selain itu hasil penelitian dapat dengan cepat di publikasikan dengan media web sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan akan lebih bermanfaat bagi semua yang membutuhkan. Selain sistem IRIS1103, LPPM-UNS juga memfasilitasi publikasi karya ilmiah atau jurnal hasil P2M yaitu portal <http://jurnal.uns.ac.id>.

Manajemen organisasi P2M yang sudah ada standar operation prosedur (SOP) dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi, meliputi Penjaminan Mutu P2M, Rekrutmen Penilai Internal P2M, Desk Evaluasi Proposal P2M, Seminar Pembahasan Proposal P2M, Penetapan Pemenang P2M, Kontrak P2M, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal, Seminar Hasil P2M Internal, Pelaporan Hasil P2M, Tindak Lanjut Hasil P2M, Kegiatan Pelatihan, dan Sistem Penghargaan (Reward). Melalui berbagai program dan strategi yang telah dilaksanakan oleh LPPM UNS. Beberapa langkah dapat disebutkan adalah:

- a. Pelatihan dan seleksi proposal dosen untuk diikuti sertakan dalam kompetisi proposal penelitian di lingkungan DP2M Dikti, Ristek, dan sumber-sumber pendanaan lain di tingkat nasional.
- b. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta
- c. Penyediaan anggaran di tingkat fakultas dan universitas untuk kegiatan penelitian dosen.

d. Menyelenggarakan kolaborasi riset dengan mitra perguruan tinggi dan industri di dalam dan luar negeri.

Berbagai uraian diatas memberikan gambaran tentang kondisi manajemen P2M di UNS. Dalam kerangka pengembangan dan perumusan kebijakan strategis terkait dengan P2M maka perlu diperhitungkan kekuatan dan kelembagan serta tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi oleh rencana pengembangan penelitian dimasa datang.

#### **4. Analisis SWOT:**

Gambaran kondisi internal yang mempengaruhi kinerja P2M meliputi kekuatan dan kelemahan; kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja P2M, meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi unit kerja LPPM/LPM dalam merealisasikan visi dan objektif yang telah dirumuskan. Hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.13 Pilihan-pilihan Stratejik Pengembangan P2M UNS**

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p><b>KEKUATAN (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah memiliki Visi Misi dan Tujuan yang jelas.</li> <li>• Sudah memiliki Struktur organisasi yang, jelas dengan job description yang jelas</li> <li>• Sudah memiliki RENOP</li> <li>• Didukung oleh 24 Pusat studi, 17 Pusat sudah terakreditasi dan 7 Pusat masih rintisan</li> <li>• Memiliki Pusat Studi yang menangani HAKI</li> <li>• Sudah tersertifikasi ISO 9001 tahun 2008</li> <li>• Peraihan dana penelitian dan pengabdian dari luar cukup tinggi.</li> <li>• Memiliki gedung sendiri yang representatif</li> <li>• Meningkatnya iklim persaingan akademis serta produktivitas penelitian</li> <li>• Kemampuan untuk mengembangkan unit bisnis</li> <li>• penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen di Universitas Sebelas Maret Surakarta ada tiga bidang ilmu dengan besaran prosentase hampir sama dan lebih unggul dari bidang ilmu yang lainnya, adalah bidang ilmu Pertanian, Rekayasa dan MIPA</li> </ul>	<p><b>KELEMAHAN (w)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budaya meneliti dan mengabdikan dosen di lingkungan UNS masih terbatas dan belum merata sehingga produktivitas dan kualitas P2M masih belum optimal.</li> <li>• Lemahnya koordinasi antara LPPM dengan fakultas (dalam hal penelitian dan publikasi ilmiah)</li> <li>• Peraihan HAKI masih dalam proses invensi (belum keluar sertifikat HAKI)</li> <li>• Sarana kurang memadai</li> <li>• Kebijakan dan program P2M di UNS lebih bersifat reaktif terhadap permintaan sesaat</li> <li>• Rendahnya komitmen SDM UNS pada kegiatan riset dan pengabdian.</li> <li>• Promosi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang.</li> <li>• Kapasitas TIK (teknologi Informasi dan komputerisasi) belum memadai</li> <li>• Keterbatasan Dana operasional Pusat Studi</li> <li>• Kapabilitas dalam menggalang dana masih terbatas; Tenaga akademik yang kompeten menjalankan bisnis masih terbatas.</li> </ul>
--	---	---



<p>PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya berbagai macam tawaran hibah /dana penelitian dan pengabdian.</li> <li>• Pemanfaatan sistem jaringan, teknologi, informasi dan komunikasi, terutama dengan <i>open source platform</i></li> <li>• Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi (pengakuan).</li> <li>• Tersedia hibah riset dari pemerintah kota dan provinsi yang cukup besar.</li> <li>• Tersedianya berbagai Media publikasi dengan berbagai tingkatan (regional-Nasional-Internasional)</li> <li>• Kerjasama dan kolaborasi dengan industri, pemerintah, universitas luar negeri, dan insititusi luar negeri.</li> </ul>	<p>S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapabilitas peraihan HAKI dan atau PATEN</li> <li>• Pembangunan kemitraan dan kolaborasi yang efektif.</li> <li>• Diversifikasi, diferensiasi, <i>positioning</i> dan <i>branding</i> program P2M</li> </ul>	<p>W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dan pengembangan.</li> <li>• Peningkatan publikasi ilmiah</li> <li>• Pemenuhan kelengkapan sarana prasarana Pusat Studi LPPM</li> <li>• integrasi dan peningkatan sinergi pendidikan, penelitian dan pengabdian</li> <li>• peningkatan koordinasi dan senergi antara LPPM dan fakultas.</li> <li>• Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran LPPM (Road Map, Renstra )</li> <li>• Peningkatan pencitraan public melalui branding LPPM</li> <li>• Peningkatan alokasi penganggaran dana penelitian dan pengabdian di tingkat Pusat LPPM</li> </ul>
--	--	--

<p>ANCAMAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuntutan penentuan peringkat PT tingkat dunia (THES dan webometric) terutama dari bidang penelitian dan pengabdian.</li> <li>• Tuntutan mutu, dan relevansi hasil penelitian dan pengabdian yang tinggi</li> <li>• Tuntutan tata kelola Lembaga yang baik.</li> <li>• Tantangan promosi dan branding yang agresif dari LPPM universitas pesaing (swasta nasional)</li> </ul>	<p>T-S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mutu penelitian dan publikasi internasional untuk menunjang peringkat berdasarkan THES dan webometric</li> <li>• Menjaga sertifikasi ISO 2008</li> <li>• Peningkatan pencitraan public / <i>Branding Image</i> layanan LPPM</li> </ul>	<p>T-W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemampuan peneliti (SDM) dalam rangka menunjang THES</li> <li>• Peningkatan kesadaran etika dan budaya organisasi LPPM</li> <li>• Pencitraan kepuasan pelanggan</li> </ul>
--	--	--

### **BAB III. GARIS BESAR RENSTRA BISNIS P2M LPPM UNS**

Pencapaian visi universitas memerlukan kerja keras seluruh unit dan lembaga di lingkungan UNS untuk berkontribusi nyata melalui capaian kinerja yang terukur. Untuk memberi arah yang jelas dan terukur pada pencapaian visi dan misi UNS telah ditetapkan Renstra Bisnis UNS tahun 2015-2019. Sasaran dan indikator capaian tiap bidang telah dituangkan secara rinci dalam Renstra Bisnis UNS yang implementasinya memerlukan penahapan dan penjabaran lebih lanjut di setiap unit dan lembaga.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNS di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. LPPM memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk pencapaian sejumlah sasaran terutama untuk mendukung terwujudnya UNS sebagai universitas bertaraf internasional. Karena itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS perlu menetapkan sasaran yang lebih rinci hingga tahun 2021 dengan memperhatikan Renstra Bisnis UNS 2015-2019.

#### **3.1. Tujuan**

Berdasarkan visi, misi dan hasil evaluasi diri serta analisis SWOT, maka tujuan utama penyusunan Renstra Bisnis P2M Universitas Sebelas Maret, adalah meningkatkan kualitas dan luaran P2M di UNS, dengan tujuan khusus adalah

- a. Memperkuat UNS sebagai universitas bertaraf internasional berciri global melalui publikasi hasil-hasil pengabdian yang unggul dan berkualitas, serta memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Sebagai fundamen penyelenggaraan kegiatan P2M yang menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Menjadi acuan kegiatan P2M yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya
- d. Dalam perspektif jangka panjang, RSB-P2M LPPM UNS disusun sebagai dasar upaya pengembangan pusat-pusat keunggulan yang dapat melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat serta mendorong pusat-pusat keunggulan dapat

memiliki kemampuan menghasilkan *revenue generating* yang ditumbuhkan melalui skema *spin off*.

### **3.2. Sasaran**

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran P2M LPPM UNS yang dikembangkan adalah meningkatkan peran serta dan kontribusi UNS pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bangsa dengan dukungan luaran P2M di UNS, dengan sasaran khusus adalah :

1. Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan tingkat kompetisi tinggi.
2. Meningkatkan jumlah kelompok sasaran (desa mitra, desa binaan, dan kelompok binaan) dengan kemandirian yang kuat .
3. Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat berbasis luaran penelitian
4. Meningkatkan jumlah mitra baik institusi Pemerintah maupun Swasta dalam program pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan jumlah mitra baik institusi Pemerintah maupun Swasta dalam program KKN -Ppemberdayaan masyarakat.
6. Meningkatkan jumlah mitra baik institusi Pemerintah maupun Swasta dalam program pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan HKI untuk hasil penelitian dan P2M serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan HKI.
8. Meningkatkan kemandirian lembaga dan pusat-pusat studi pemberdayaan pada masyarakat.

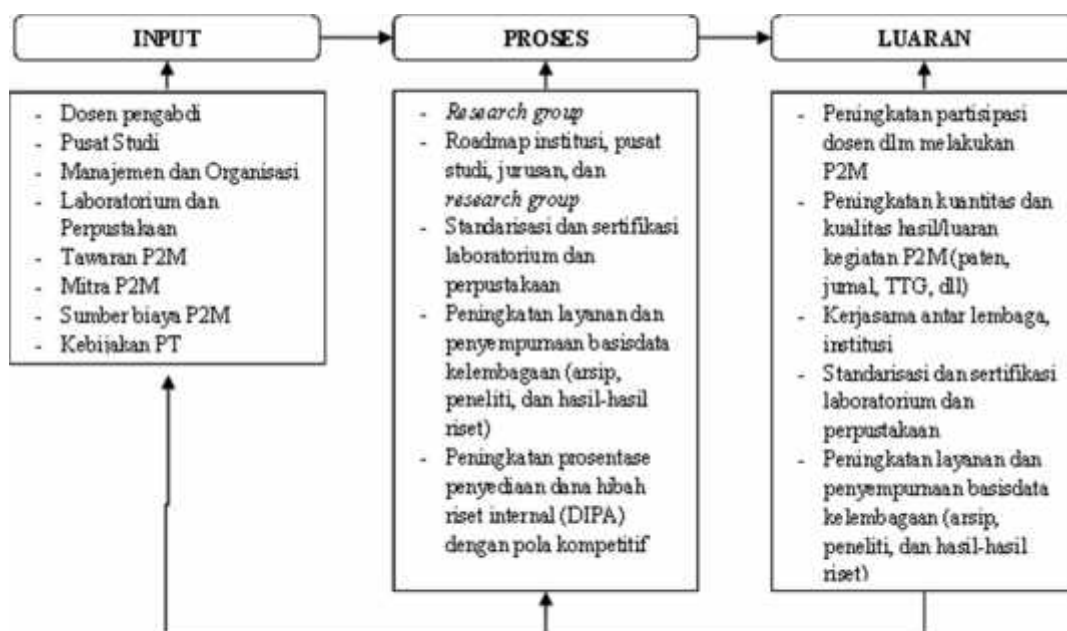
### **3.3. Strategi dan Kebijakan P2M LPPM UNS**

Program kerja dan strategi kebijakan pengembangan P2M LPPM UNS dengan berbasis pada i aspek input, proses dan output adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan manajemen dan metodologi penelitian dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,
2. Memfasilitasi pengembangan kelompok penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang antar disiplin
3. Memfasilitasi pengembangan proposal P2M yang bermutu dan berdaya saing tinggi,
4. Melakukan P2M yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kecerdasan bangsa,
5. Menerapkan kegiatan P2M berbasis hasil penelitian khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa,

6. Meningkatkan pusat-pusat penelitian yang bertaraf nasional dan internasional berbasis isu-isu global, nasional dan kewilayahan,
7. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi P2M yang mudah, akurat, dan murah
8. Mengembangkan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi didalam maupun luar negeri.

Strategi pendekatan penyusunan rencana strategis dilakukan secara berjenjang didasarkan pada evaluasi diri, RENIP, Renstra Bisnis UNS *Academic Plan* dan masukan masing-masing fakultas yang dirangkum dari Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Peta strategis pengembangan P2M LPPM UNS

- **Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk dapat melaksanakan strategi kebijakan P2M LPPM UNS dengan berbasis pada analisis PDCA, maka tahapan pengelolaan P2M meliputi:

**Tabel 3.1.** Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat\*

No.	Parameter	Ketersediaan Prosedur/Pedoman (SOP)	
		Ada	Tidak ada
1	Rekrutmen <i>reviewer</i> internal	Ada	
2	Keterlibatan <i>reviewer</i> external dalam seleksi proposal internal	Ada	
3	Seleksi proposal internal ( <i>desk evaluation</i> , seminar proposal)	Ada	
4	Pengumuman penetapan pemenang	Ada	
5	Kontrak Lembaga dengan pengusul	Ada	
6	Monev lapangan internal	Ada	
7	Seminar hasil internal	Ada	
8	Tim <i>follow up</i> hasil pengabdian (arahan hasil pengabdian untuk jurnal, HKI, atau TTG)		Tidak
9	<i>Reward</i> bagi pelaksana pengabdian yang berprestasi & <i>punishment</i> yang melanggar ketentuan		Tidak
10	Pelaporan (output) Lembaga ke Dikti	Ada	
11	Kemudahan bagi pelaksana pengabdian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan<sup>1</sup></li> <li>- Pelaksanaan<sup>2</sup></li> <li>- Penuntasan<sup>3</sup></li> </ul>		Tidak
12	Pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan proposal</li> <li>- Penulisan karya ilmiah</li> <li>- HKI/Paten</li> </ul>	Ada	
13	<b>Lembaga Kontrol Internal (Lembaga Pengaduan Pengabdian Kepada Masyarakat)</b>		Tidak

Indikator untuk mengukur pencapaian sasaran bidang P2M disajikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**Indikator Capaian Rencana P2M Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2015)	Capaian tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset</b>						
a	Publikasi Ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat (Jurnal, koran dll)	181					
b	Pengabdian Kepada Masyarakat	IbM	352				
		IbK	1				
		IbPE	8				
		IbPUD	7				
		IbKIK	20				
		IbW	1				
		IbW-CSR	0				
		IbDM	0				
		Hi-link	2				
	KKN-PPM	16					
c	Sebagai pemakalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	150					
d	Teknologi Tepat Guna	21					
e	HKI	31					
f	Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial	226					
g	Buku Ajar (ISBN)	236					
h	Jumlah Dana Kerjasama P2M	Internal UNS	8,3 M				
		Nasional	8,9 M				
		Lain-lian (Pemda, Industra, CSR, UKM)	3,6 M				
1	Unit Bisnis hasil penelitian	42					
j	Kontrak kerja P2M	207					
k	Jumlah mitra P2M	305					
<b>2</b>	<b>Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen</b>						
		<b>1:6</b>					
<b>3</b>	<b>Jumlah pengabdian unggulan Pusat Studi</b>						
		<b>5</b>					
<b>4</b>	<b>Jumlah kegiatan pelatihan yang dikelola Pusat tiap tahun</b>						
		<b>10</b>					

- **Pengembangan Kuliah Kerja Nyata**

Sasaran yang akan dicapai pada bidang pengembangan KKN ada dua yaitu:

1. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam program KKN kebinekaan di daerah 3T (daerah tertinggal, terbelakang dan terdepan)
2. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam program KKN di Tingkat International
3. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam program KKN-PPM
4. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam program KKN mandiri
5. Peningkatan jumlah Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) .

Indikator untuk mengukur pencapaian sasaran bidang pengembangan KKN disajikan pada Tabel 3.3.

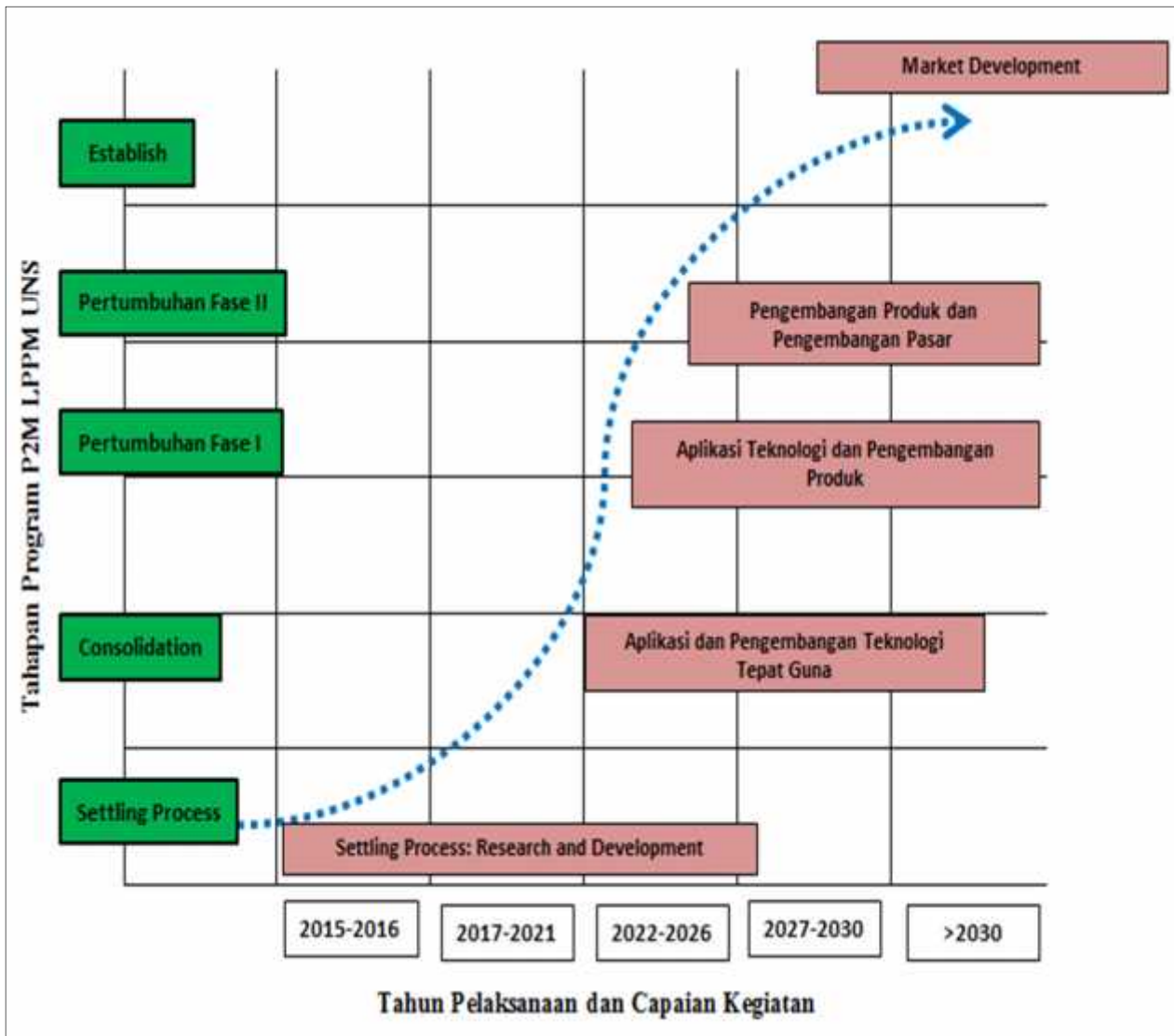
**Tabel 3.3** Indikator Pengukur Capaian Sasaran Bidang Pengembangan KKN

Indikator Kinerja Utama	Kondisi awal (2015)	Capaian tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
KKN-PPM	100						
KKN Mandiri	577						
KKN kebinekaan	13						
KKN – Vokasi daerah 3T	20						
KKN internasional	16						
Jumlah mitra KKN	3						
Jumlah DPL	261						
Ration dosen : mahasiswa	1:19						
KKN reguler	4241						
KKN IbM	-						

#### 3.4. Formulasi Strategi Pencapaian

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa formulasi strategi pengembangan P2M LPPM UNS, disusun secara bertahap, dengan masing-masing tahapan direncanakan selama 5 tahun, dalam jangka waktu selama 25 tahun. Seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini.





**Gambar 3.2.** Periodisasi Strategi Pengembangan P2M LPPM UNS

Tahapan pengembangan riset strategis UNS disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4.** Strategi Pengembangan P2M UNS

Tahap Pengembangan Strategi	Settling	Konsolidasi	Pertumbuhan 1	Pertumbuhan 2	Mapan
<i>Sumberdaya Manusia</i>	<i>Aktivitas</i>				
	2015 – 20 16	2017 - 2018	2019- 2023	2024 - 2028	2029 - 2035
Peningkatan kualitas P2M dan KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan kompetensi SDM dalam P2M dan KKN</li> <li>• Pengembangan program P2M dan KKN unggulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Internalisasi</li> <li>▪ Berjalannya proses bisnis</li> <li>▪ Berbagi resiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tumbuhnya jaringan kerjasama riset</li> <li>▪ Tumbuhnya jaringan P2M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencapaian keunggulan signifikan</li> <li>▪ Capaian unggulan komparative</li> </ul>	Indikator WCU
Pengembangan pusat kepakaran P2M dan KKN dan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan kepakaran P2M, KKN, Kwu</li> <li>• Pengembangan kepakaran P2M, KKN, Kwu</li> <li>• Pengembangan pusat P2M , KKN &amp; Kwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ P2M Dasar : 45</li> <li>▪ P2M Pengbng 30</li> <li>▪ P2M Aplikasi industri 25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ P2M Dasar : 40</li> <li>▪ P2M Pengbng 30</li> <li>▪ P2M Aplikasi industri 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ P2M Dasar : 30</li> <li>▪ P2M Pengbng 30</li> <li>▪ P2M Aplikasi industri 40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ P2M Dasar : 20</li> <li>▪ P2M Pengbng 30</li> <li>▪ P2M Aplikasi industri 50</li> </ul>
Pengembangan P2M	3 bidang	4 bidang	5 bidang	6 bidang	7 bidang
Pengembangan KKN					
Pengembangan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan kegiatan Kwu</li> <li>• Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa berwirausaha</li> <li>• Pengembangan inkubator bisnis</li> </ul>				
<i>Teknologi Tepat Guna</i>	<i>Aktivitas</i>				
	•				

<i>Rekayasa Sosial</i>	<i>Aktivitas</i>				
Proporsi dosen yang masuk dalam <i>research group</i>	10%	25%	50%	75%	100%
Partisipasi dosen	55%	65%	75%	85%	100%
Jurnal nasional (yang diterbitkan)	400	410	435	470	>470
<i>Jurnal Internasional</i>	42	45	50	60	>60
Riset unggulan	250	400	600	800	>800
Kerjasama internasional	6	10	15	20	>25
Usulan Paten	15	25	40	55	>55
<i>Spin of industry</i> (menciptakan industri untuk tumbuh)	2	4	6	8	10
Kebijakan publik					
<i>Pengembangan Kelembagaan LPPM</i>	<i>Aktivitas</i>				
<b>Peningkatan perolehan HKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan hasil riset &amp; teknologi yg berpotensi HKI</li> <li>• Fasilitas perolehan HKI</li> <li>• Pemantauan/pengawasan perolehan HKI</li> </ul>				
<b>Pengembangan produk unggulan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan produk unggulan yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa</li> <li>• Pengembangan roadmap produk unggulan</li> <li>• Fasilitas pengembangan produk unggulan</li> <li>• Pengembangan show room produk unggulan</li> </ul>				

<b>Peningkatan jaringan dan kerjasama kemitraan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan jaringan komunikasi yang handal dan profesional</li> <li>• Pengembangan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra</li> <li>• Penguatan jaringan alumni</li> </ul>				
<b>Peningkatan tatapamong LPPM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan beban kerja unit dan beban kerja SDM</li> <li>• Pengembangan SOP proses bisnis LPPM</li> <li>• Pengembangan SPM LPPM</li> <li>• Pengembangan kompetensi SDM LPPM</li> <li>• Peningkatan akutanbilitas dan transparansi LPPM</li> <li>• Pengembangan kantitas, kualitas dan akutanbilitas Sistem informasi manajemen (SIM) LPPM</li> <li>• SIM sebagai decision maker support system</li> </ul>				
<b>Pengembangan P2M unggulan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>				
<b>Pengembangan Pusat Pelatihan dan diklat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>				

- a. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil P2M
  - 1) Menyusun dan mengembangkan roadmap P2M sesuai dengan visi misi lembaga, pengembangan ilmu, dan kebutuhan masyarakat.
  - 2) Meningkatkan mutu kinerja organisasi pelaksanaan P2M.
  - 3) Meningkatkan kinerja dan produktivitas pusat-pusat studi.
  - 4) Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan P2M unggulan.
  - 5) Menyediakan insentif untuk P2M kompetitif.
  - 6) Memfasilitasi dosen dalam peraihan dana P2M kompetitif.
  - 7) Memperkuat infrastruktur penelitian dan pengabdian.
- b. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat
  - 1) Melakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan kurang-berdayaan masyarakat dan kebutuhan pembangunan bangsa
  - 2) Meningkatkan mutu kinerja organisasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
  - 3) Meningkatkan kinerja dan produktivitas pusat-pusat studi, khususnya yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.
  - 4) Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan kegiatan unggulan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
  - 5) Menyediakan insentif untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - 6) Memfasilitasi dosen dalam peraihan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kompetitif
  - 7) Memperkuat infrastruktur pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan Publikasi Ilmiah, pemerolehan HKI, dan paten
  - 1) Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun karya ilmiah untuk publikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
  - 2) Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun buku berbasis hasil penelitian.
  - 3) Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan inovasi dan barang ciptaan.
  - 4) Peningkatan kompetensi paten drafting, HKI, dan desain industri berbasis inovasi dan budaya lokal.
  - 5) Menyediakan insentif desain dan inovasi unggulan UNS.

d. Peningkatan perluasan kerja sama

- 1) Membangun kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan inovasi/keunggulan UNS.
- 2) Mengembangkan *revenue generating unit* terpadu dalam pemasaran inovasi/keunggulan UNS.

## **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA P2M**

### **4.1. Program P2M**

Program P2M di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tiga tahun terakhir berdasarkan 10 skema pengabdian yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM), memiliki perkembangan yang cukup relevan, prosentase diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Program kerja dan strategi kebijakan pengembangan P2M LPPM UNS dengan berbasis pada aspek input, proses dan output. Untuk mendukung kegiatan P2M, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sebelas Maret telah banyak melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan Pemda atau Intansi lain.

### **4.2. Kegiatan P2M**

Penentuan kegiatan P2M, berdasarkan isu-isu strategis bidang P2M yang ada di lingkungan global, nasional dan wilayah dilakukan dengan pemetaan terlebih dahulu berkaitan dengan kebijakan pada tingkatan internasional, nasional maupun regional (provinsi). Pemetaan tersebut Program dan Jenis Kegiatan PPM Sinergistik berbasis Kebhinekaan Intelektual Kewilayahan disajikan pada Tabel 4.1 :

**Tabel 4.1** Program dan Jenis Kegiatan PPM Sinergistik berbasis Kebhinekaan Intelektual Kewilayahan

Isu Global/ Nasional/ Wilayah dan RPJM	Isu Prioritas	Persoalan Prioritas	Solusi Persoalan Prioritas	Program dan Jenis Kegiatan	Kompetens/ Keahlian/ Keilmuan Pelaksana	Kemitraan PT/UMKM/CSR/ PKBL/Pemda	Sumber Dana				
							PT	CSR	PEMDA	DIKTI	Sumber Lain
<p><b>1. Isu Global:</b></p> <p>a. Lingkungan Hidup.</p> <p>b. Perkembangan Ekonomi.</p> <p>c. Perkembangan Teknologi Informasi.</p> <p>d. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).</p> <p><b>2. Isu Nasional:</b></p> <p>a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.</p> <p>b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,</p>	Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan kekuasaan yang terbentuk dari cara produksi-konsumsi manusia terhadap sumberdaya strategis, antara lain berupa tanah, air, dan udara.</li> <li>• Akses pembangunan seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.</li> <li>• Memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial.</li> <li>• Pengembangan jejaring kemitraan.</li> <li>• Peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.</li> <li>• Memperluas kesempatan kerja dan usaha.</li> <li>• Pengurangan jumlah masyarakat miskin dengan meningkatkan hubungan industrial dan syarat kerja.</li> <li>• Pengurangan jumlah masyarakat yang miskin dengan pembangunan daerah dan perluasan lapangan pekerjaan.</li> <li>• Peningkatan kinerja tenaga kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2M KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• P2M PNBP UNS</li> <li>• KKN Tematik KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• KKN Tematik PNBP UNS</li> <li>• KKN Mandiri</li> <li>• KKN UNS-Pemda</li> <li>• KKN UNS-CSR</li> <li>• PKBL Pemda</li> <li>• Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pihak-Pihak Lain</li> </ul>					
	Kedaulatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata kelola pangan membuka ruang yang sangat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi agraria dengan melindungi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2M KEMENRISTEK DIKTI</li> </ul>					



<p>demokratis, dan terpercaya.</p> <p>c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.</p> <p>d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p> <p>e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.</p> <p>f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit</p>	Pangan	<p>luas bagi pemilik modal dan industri besar untuk memproduksi pangan secara massal, sehingga produsen pangan kecil menjadi tidak berdaya dan rakyat menjadi tergantung pada produk pangan massal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam membangun kemampuan pangan lokal berdaulat, yang didukung dengan regenerasi petani, penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan.</li> </ul>	<p>menata ulang sumber-sumber produksi pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya, dan kearifan lokal.</li> <li>• Menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil.</li> <li>• Mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal, dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal.</li> </ul>	<p>sektor pertanian suatu wilayah bebas rawan pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesejahteraan petani melalui masukan teknologi dan rekomendasi skim permodalan.</li> <li>• Efisiensi usaha tani.</li> <li>• Peningkatan produksi dengan pengembangan teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2M PNBP UNS</li> <li>• KKN Tematik KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• KKN Tematik PNBP UNS</li> <li>• KKN Mandiri</li> <li>• KKN UNS-PEMDA</li> <li>• KKN UNS-CSR</li> <li>• PKBL PEMDA</li> <li>• Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pihak-Pihak Lain</li> </ul>					
	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhambatnya administrasi dalam pemberian bantuan bagi sekolah umum, agama, kejuruan dan sekolah khusus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah sekolah penerima bantuan semakin merata.</li> <li>• Aksesibilitas siswa miskin terhadap pendidikan makin meningkat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata dan terjangkau.</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan kreatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2M KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• P2M PNBP UNS</li> <li>• KKN Tematik KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• KKN Tematik</li> </ul>					

<p>bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</p> <p>g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</p> <p>h. Melakukan revolusi karakter bangsa.</p> <p>i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan model pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin.</li> <li>• Meningkatnya alternatif pendidikan yang sesuai kapasitas warga miskin.</li> <li>• Meningkatnya akses pendidikan berbasis kearifan lokal bagi warga miskin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan jumlah SMK berbasis potensi lokal.</li> <li>• Jumlah warga miskin yang memperoleh akses pendidikan semakin meningkat.</li> <li>• Tersedianya model pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin.</li> <li>• Tersedianya model pendidikan non-formal berbasis komunitas bagi warga miskin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pendidikan dan potensi wilayah.</li> </ul>	<p>Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>	<p>PNBP UNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KKN Mandiri</li> <li>• KKN UNS-PEMDA</li> <li>• KKN UNS-CSR</li> <li>• PKBL PEMDA</li> <li>• Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pihak-Pihak Lain</li> </ul>					
<p><b>3. Isu Wilayah:</b></p> <p>a. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.</p> <p>b. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, Dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustrialisasi.</p>	<p>Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi biaya kesehatan bagi warga miskin.</li> <li>• Adanya pengembangan sistem alokasi sumber daya manusia di bidang kesehatan antar kabupaten/kota.</li> <li>• Adanya pengembangan kesehatan lingkungan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya sinkronisasi penyaluran subsidi biaya kesehatan bagi warga miskin.</li> <li>• Meningkatnya subsidi biaya kesehatan bagi warga miskin.</li> <li>• Meningkatnya pemerataan distribusi sumber daya manusia di bidang kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau.</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.</li> <li>• Pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan yang sehat bagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2M KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• P2M PNBP UNS</li> <li>• KKN Tematik KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• KKN Tematik PNBP UNS</li> <li>• KKN Mandiri</li> <li>• KKN UNS-PEMDA</li> <li>• KKN UNS-CSR</li> <li>• PKBL PEMDA</li> <li>• Kerjasama</li> </ul>					

<p>c. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Dan Penataan Ruang.</p> <p>d. Meningkatkan Reformasi Birokrasi, Dan Pelayanan Publik.</p> <p>e. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial Dan Harmoni Sosial.</p>		<p>promosi kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>antar kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan sistem alokasi sumber daya manusia di bidang kesehatan.</li> <li>• Terdapatnya model penyehatan lingkungan berefek patologis.</li> <li>• Terbangunnya sistem sanitasi yang sehat.</li> <li>• Terbentuknya mekanisme pengendalian kesehatan individual dan masyarakat.</li> <li>• Meningkatnya kualitas air, tanah, dan udara.</li> </ul>	<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan penyakit.</li> </ul>		<p>Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pihak-Pihak Lain</p>						
	<p>Pembangunan Infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi.</li> <li>• Adanya kesenjangan antar wilayah yang memerlukan pembenahan infrastruktur agar memberikan dampak positif pada pengurangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan.</li> <li>• Pengembangan teknologi informasi yang mampu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang memadai.</li> <li>• Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung.</li> <li>• Meningkatkan layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2M KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• P2M PNBPN UNS</li> <li>• KKN Tematik KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• KKN Tematik PNBPN UNS</li> <li>• KKN Mandiri</li> <li>• KKN UNS-PEMDA</li> <li>• KKN UNS-CSR</li> </ul>						

		<p>beban mobilisasi sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar kabupaten/kota.</p>	<p>menjangkau hingga tingkat desa sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lebih terbuka dan intensif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan soft power melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.</li> <li>• Penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif.</li> </ul>	<p>infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas lingkungan.</li> <li>• Meningkatnya layanan infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian masyarakat.</li> <li>• Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKBL PEMDA</li> <li>• Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pihak-Pihak Lain</li> </ul>						
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

	Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhubungan dengan kemiskinan.</li> <li>• Fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri dan perdagangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha.</li> <li>• Peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLH).</li> <li>• Pendidikan yang berorientasi pasar kerja.</li> <li>• Pengembangan pasar informasi pasar kerja.</li> <li>• Pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumberdaya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah.</li> <li>• Peningkatan dukungan terhadap industri kecil menengah serta pengembangan kemitraan.</li> <li>• Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktifitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2M KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• P2M PNBP UNS</li> <li>• KKN Tematik KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• KKN Tematik PNBP UNS</li> <li>• KKN Mandiri</li> <li>• KKN UNS-PEMDA</li> <li>• KKN UNS-CSR</li> <li>• PKBL PEMDA</li> <li>• Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pihak-Pihak Lain</li> </ul>					
	Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkenaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya peran pemerintah dan partisipasi masyarakat yang merupakan hal penting dalam mewujudkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebagai upaya inovasi IPTEK.</li> <li>• Meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2M KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• P2M PNBP UNS</li> <li>• KKN Tematik KEMENRISTEK DIKTI</li> </ul>					

	daerah	Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014, maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	demokrasi bernegara yang baik. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondusivitas daerah ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.</li> </ul>	tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan daya ekonomi dan pembangunan daerah. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengelolaan aparatur.</li> <li>• Meningkatkan pelayanan publik secara profesional.</li> <li>• Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KKN Tematik PNBPN UNS</li> <li>• KKN Mandiri</li> <li>• KKN UNS-PEMDA</li> <li>• KKN UNS-CSR</li> <li>• PKBL PEMDA</li> <li>• Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pihak-Pihak Lain</li> </ul>					
	Pengembangan unggulan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan database industrial yang lengkap setiap daerah.</li> <li>• Peningkatan produktivitas industrial.</li> <li>• Database peluang pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya data dalam berbagai bidang yaitu potensi daerah dan infrastruktur.</li> <li>• Terciptanya rekomendasi strategi penyediaan fasilitas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan perkembangan kawasan melalui pertumbuhan industri manufaktur.</li> <li>• Peningkatan produktivitas industri melalui peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2M KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• P2M PNBPN UNS</li> <li>• KKN Tematik KEMENRISTEK DIKTI</li> <li>• KKN Tematik PNBPN UNS</li> <li>• KKN Mandiri</li> </ul>					

		industrial berbasis kekayaan alam di daerah.	insentif pendukung pemerintah dalam pendirian industri.	kompetensi SDM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengembangan kawasan unggulan melalui pengembangan ekonomi kawasan.</li> </ul>	Komunikasi Visual <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KKN UNS-PEMDA</li> <li>• KKN UNS-CSR</li> <li>• PKBL PEMDA</li> <li>• Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pihak-Pihak Lain</li> </ul>					
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

### 4.3. Program PPM di Unit Kerja/Fakultas/Jurusan yang merupakan Turunan RENSTRA-PPM

Berdasarkan penetapan program dan kegiatan P2M LPPM UNS maka dirumuskan program P2M di unit kerja/fakultas/jurusan/program studi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Sebelas Maret sebagai berikut (Tabel 4.2):

**Tabel 4.2** Prioritas Bidang P2M Tata Kelola dan Pelayanan Publik

No	Fokus Bidang	Tema	Sub Tema	Tujuan	Sasaran	Indikator	Fakultas/ Unit Kerja/ Jurusan
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Pengembangan pendidikan</b>	Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pendidikan inklusi</li> <li>• Pengembangan sekolah inklusi dan penggabungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau</li> <li>• Pengembangan: Pendidikan inklusi</li> <li>• Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan</li> <li>• Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga.</li> <li>• Pengembangan : sekolah inklusi dan penggabungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas pendidikan paud dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat</li> <li>• Tercapainya pengembangan pendidikan inklusi</li> <li>• Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya kualitas pendidikan paud dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat</li> <li>• Tercapainya pengembangan pendidikan inklusi</li> <li>• Tercapainya peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
2	<b>Peningkatan kesehatan masyarakat</b>	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>• Peningkatan kualitas layanan kesehatan</li> <li>• Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS</li> <li>• Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>• Peningkatan akses kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kualitas layanan kesehatan</li> <li>• Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS</li> <li>• Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya sarana dan prasarana serta layanan kesehatan bagi masyarakat</li> <li>• Meningkatnya penerapan PHBS dan jaminan kesehatan</li> <li>• Meningkatnya ketahanan keluarga dan program keluarga berencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya sarana dan prasarana serta layanan kesehatan bagi masyarakat</li> <li>• Terciptanya penerapan PHBS dan jaminan kesehatan</li> <li>• Terciptanya ketahanan keluarga dan program keluarga berencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>



			<p>pelayanan kesehatan dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana</li> </ul>			
3	<b>Penanggulangan kemiskinan</b>	<p>Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat</p> <p>Memperluas kesempatan kerja dan usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu</li> <li>• Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan</li> <li>• Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</li> <li>• Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</li> <li>• Pengendalian jumlah penduduk</li> <li>• Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga</li> <li>• Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan lembaga keuangan non-perbankan bagi usaha perempuan.</li> <li>• pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin; serta pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan kecil sebagai sumber pendapatan keluarga rentan miskin.</li> <li>• subsidi pendidikan dasar dan menengah bagi warga miskin.</li> <li>• subsidi biaya kesehatan bagi masyarakat miskin; serta pelayanan kesehatan terhadap emergence, re-emergence disease, dan neglected tropical disease (NTDs): kaki gajah, lumpuh layu, cacangan, lepera, frambosia, dan sebagainya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pengembangan lembaga dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan kecil sebagai sumber pendapatan keluarga rentan miskin.</li> <li>• Meningkatnya pendidikan dasar dan menengah bagi warga miskin.</li> <li>• subsidi biaya kesehatan bagi masyarakat miskin; serta pelayanan kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terciptanya pengembangan lembaga dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan kecil sebagai sumber pendapatan keluarga rentan miskin.</li> <li>• Terciptanya pendidikan dasar dan menengah bagi warga miskin.</li> <li>• Pengadaan subsidi biaya kesehatan bagi masyarakat miskin; serta pelayanan kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja</li> <li>• Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku</li> <li>• Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama dan meningkatkan perlindungan hukum yang menjamin kepastian kerja dan perlakuan yang adil bagi pekerja</li> <li>• Mendorong fungsinya secara aktif lembaga-lembaga ketenagakerjaan</li> </ul>				
4	<b>Ketahanan pangan daerah</b>	Meningkatkan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian bebas rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan</li> <li>• Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor pertanian</li> <li>• Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; serta revitalisasi sumber daya air dan pengembangan irigasi berbasis embung.</li> <li>• pengembangan kelembagaan distribusi pangan.</li> <li>• pengembangan keragaman pangan berbasis potensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menigkatnya pengembnagan lahan pertanian, pangan yang berkelanjutan selain itu juga adanya revitalisasi sumberdaya air dan pengembnagan irigasi berbasis embung</li> <li>• Meningkatkan keragaman pangan berbasis potensi lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya pengembnagan lahan pertanian, pangan yang berkelanjutan selain itu juga adanya revitalisasi sumberdaya air dan pengembnagan irigasi berbasis embung</li> <li>• Terciptanya keragaman pangan berbasis potensi lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

			<p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan</li> <li>• Rehabilitasi dan perbaikan lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan)</li> <li>• Rehabilitasi dan perbaikan lahan tambak terdegradasi dan kualitas perairan laut</li> </ul>	<p>lokal; serta pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pangan dan pengemasan (packaging).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi lahan terdegradasi</li> <li>• Perbaikan kualitas tanah pada lahan marginal</li> <li>• Rehabilitasi dan perbaikan lahan tambak terdegradasi</li> <li>• Rehabilitasi dan perbaikan kualitas perairan laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penanggulangan terhadap lahan terdegradasi dan kualitas perairan laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penanggulangan terhadap lahan terdegradasi dan kualitas perairan laut</li> </ul>	
5	<b>Daya Saing Ekonomi</b>	Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan tata kelola pemerintahan</li> <li>• Penataan organisasi/kelembagaan</li> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu</li> <li>• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah</li> <li>• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan tata kelola pemerintahan</li> <li>• Penataan organisasi/kelembagaan</li> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu</li> <li>• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah</li> <li>• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa</li> <li>• Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya tata kelola pemerintahan, penataan organisasi/kelembagaan</li> <li>• meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah</li> <li>• meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>• meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa</li> <li>• Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya peningkatan tata kelola kualitas keuangan dan asset daerah dan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>• terciptanya kualitas tata kelola pemerintahan desa</li> <li>• Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

6	<b>Infrastruktur Dasar Berkelanjutan</b>	<p>Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang memadai</p> <p>Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan)</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi</li> <li>• Menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah</li> <li>• Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan)</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi</li> <li>• Menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah</li> <li>• Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum dan sanitasi</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat</li> <li>• terciptanya kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum dan sanitasi</li> <li>• terciptanya kualitas dan kuantitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
---	--	--	---	---	--	---	---

7	<b>Tata Kelola Pemerintahan</b>	<p>Meningkatkan pelayanan publik secara professional</p> <p>Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT</li> <li>• Peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>• Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional</li> <li>• Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date</li> <li>• Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT</li> <li>• Peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>• Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional</li> <li>• Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date.</li> <li>• Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pelayanan publik yang berbasis IT</li> <li>• Meningkatnya pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah</li> <li>• Meningkatnya pelayanan publik yang lebih akurat serta adanya pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya pelayanan publik yang lebih akurat, berbasis IT dan terkelolanya arsip perpustakaan dengan baik serta pengembangan penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
8	<b>Pengembangan unggulan kawasan</b>	<p>Meningkatkan perkembangan kawasan melalui pertumbuhan industri manufaktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan daya tarik industrial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan database industrial yang lengkap setiap daerah</li> <li>• fasilitas dan insentif pendukung</li> <li>• jejaring industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database potensi daerah</li> <li>• Database infrastruktur</li> <li>• Rekomendasi SWOT</li> <li>• Rekomendasi Strategi penyediaan fasilitas dan insentif pendukung dari pemerintah dalam pendirian industri / perusahaan di berbagai negara kompetitor</li> <li>• Kapasitas industri dan perkembangannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercipnya data dalam berbagai bidang yaitu potensi daerah dan infrastruktur</li> <li>• Terciptanya rekomendasi strategi penyediaan fasilitas dan insentif pendukung pemerintah dalam pendirian industri</li> <li>• Terciptanya kapasitas industri dan perkembangannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

**Tabel 4.3** Prioritas Bidang P2M Sosial Kemasyarakatan

No	Prioritas Bidang	Tema	Sub Tema	Tujuan	Sasaran	Indikator	Fakultas/ Unit Kerja/ Jurusan
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Pengembangan pendidikan</b>	Pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran pemuda dalam bidang olahraga, penemuan karya dan pengembangan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga</li> <li>• Mengidentifikasi penemuan karya cipta (invention) yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• Mengidentifikasi inovasi-inovasi (pengembangan) yang mampu meningkatkan kesejahteraan</li> </ul>	Penemuan-penemuan yang dilakukan masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan	Teridentifikasinya penemuan dalam bidang ipteks, pertanian perikanan, industri, dan aksesabilitas bagi warga yang kurang beruntung. Serta teridentifikasinya inovasi-inovasi di berbagai bidang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
2	<b>Pelayanan kesehatan masyarakat</b>	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya kesehatan masyarakat</li> <li>• Upaya kesehatan perorangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan penuntasan layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di puskesmas dengan menyederhanakan mekanisme administrasi</li> <li>• Pembebasan biaya retribusi berobat di puskesmas bagi masyarakat umum</li> <li>• Pengembangan dan penuntasan revitalisasi puskesmas dengan tempat perawatan.</li> <li>• Penyedia tenaga dokter spesialis pada puskesmas secara bertahap</li> <li>• Pelunasan fungsi pelayanan pondok bersalin desa.</li> <li>• Pengadaan peralatan dan pembekalan kesehatan termasuk obat generik.</li> </ul>	Peningkatan layanan kesehatan bagi keluarga miskin dan peningkatan jumlah tenaga medis di berbagai rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya layanan kesehatan bagi masyarakat</li> <li>• Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat yang berobat ke puskesmas dan jaringannya</li> <li>• Tersusunnya standar pelayanan minimal puskesmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat</li> <li>• Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaran puskesmas dan jaringannya</li> <li>• Penyusunan standar pelayanan minimal puskesmas dan jaringannya</li> <li>• Pengembangan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin</li> <li>• Revitalisasi rumah sakit daerah</li> <li>• Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit</li> <li>• Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat</li> <li>• Penyusunan standar pelayanan minimal rumah sakit.</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

3	<b>Penanggulangan kemiskinan</b>	Pengurangan jumlah masyarakat yang miskin dengan meningkatkan hubungan industrial dan syarat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan hubungan industrial dan syarat kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan permasalahan dan solusi pemecahan perselisihan hubungan industrial di kabupaten .</li> <li>• Fasilitas pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara konsisten dan transparan</li> <li>• Pembentukan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan</li> <li>• Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memetakan perselisihan dan memfasilitasi dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara konsisten dan transparan memberdayakan mediator, konsiliator dan arbiter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasinya permasalahan dan terumuskannya pemecahan perselisihan hubungan antar industrial</li> <li>• Tercegahnya dan terselesainya permasalahan hubungan industrial secara konsisten</li> <li>• Terbentuknya dan berdayanya lembaga-lembaga ketenagakerjaan</li> <li>• Berdayanya mediator, konsiliator dan arbiter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
4	<b>Ketahanan pangan daerah</b>	Peningkatan kesejahteraan petani melalui masukan teknologi dan rekomendasi skim permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan petani pada akses modal, sarana produksi, dan teknologi melalui penguatan daya tawar dan kelembagaan petani</li> <li>• Pemasaran hasil pertanian</li> <li>• Peningkatan keanekaragaman bahan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan petani dengan nelayan melalui penguatan kelembagaan petani dan nelayan</li> <li>• Peningkatan akses petani dan nelayan terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi dan pasar</li> <li>• Pengembangan pemasaran hasil pertanian (termasuk hasil ternak dan perikanan)</li> <li>• Identifikasi ragam jenis dan kapasitas tanaman sumberkarbohidrat</li> <li>• Peningkatan kenampakan dan kualitas bahan pangan sumber karbohidrat selain padi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi metode pembinaan kelembagaan petani yang tangguh, berdayaguna dan berkelanjutan</li> <li>• Rekomendasi tentang skim permodalan dan rekomendasi teknologi yang dapat diadopsi petani</li> <li>• Rekomendasi model dan kebijakan pemasaran hasil pertanian yang menguntungkan petani</li> <li>• Tersedianya basis data tentang ragam, jenis dan kapasitas tanaman sumber karbohidrat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya lembaga/kelompok tani yang berdaya guna, tangguh dan berkelanjutan</li> <li>• Berkembangnya industri pembuatan pangan sumberkarbohidrat selain beras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi teknologi pembuatan pangan sumber karbohidrat dan teknologi pengkayaan gizi</li> </ul>		
5	<b>Daya Saing Ekonomi</b>	Peningkatan dukungan terhadap industri kecil menengah serta pengembangan sistem kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif</li> <li>• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah</li> <li>• Pengembangan sistem kemitraan UMKM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan regulasi untuk menciptakan iklim yang positif</li> <li>• Pengembangan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah</li> <li>• Mengembangkan sistem kemitraan antarab UMKM dan koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya regulasi untuk menciptakan iklim yang positif</li> <li>• Berkembangnya jaringan kerjasama antar industri kecil</li> <li>• Berkembangnya struktur kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terciptanya regulasi untuk menciptakan iklim yang positif</li> <li>• Berkembangnya jaringan kerjasama antar industri kecil</li> <li>• Berkembangnya struktur kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
6	<b>Infrastruktur Dasar Berkelanjutan</b>	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah  Meningkatnya kualitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi</li> <li>• Beban biaya transportasi</li> <li>• Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi</li> <li>• Menjamin keberlanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi pengaruh rendahnya akses masyarakat terhadap transportasi</li> <li>• Identifikasi faktor-faktor yang mendorong keputusan untuk memilih mode angkutan terutama ketersediaan penumpang untuk berganti mode angkutan selama perjalanan</li> <li>• Pengembangan elastisitas permintaan yang lebih baik</li> <li>• Investigasi pilihan dan kelayakan adanya permintaan responsive dari angkuatan umum untuk route</li> </ul>	Meningkatkan tingkat penyediaan kebutuhan akan jasa transportasi dari masyarakat dan mengantisipasi kelangkaan BBM dan energi di masa yang akan datang	Peningkatan penyediaan kebutuhan transportasi dari masyarakat dan terantisipasinya kelangkaan BBM dan energi dimasa yang akan datang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungan biaya transportasi dan beban-beban lainnya</li> <li>• Evaluasi pengaruh meningkatnya tarif angkutan umum terhadap masyarakat golongan rendah</li> <li>• Evaluasi efektifitas dan operasionalisasi sistem manajemen resiko</li> <li>• pengaruh obat-obatan alkohol dan kelelahan dari pengguna jalan</li> <li>• Ketersediaan BBM dan harga BBM</li> </ul>			
7	<b>Tata Kelola Pemerintahan</b>	Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengelolaan aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sumberdaya manusia aparatur</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>• Peningkatan kerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kembali sumberdaya aparatur sesuai kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi pegawai negeri sipil</li> <li>• Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumberdaya aparatur, terutama pada sistem karier dan remunerasi</li> <li>• Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</li> <li>• Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan aparatur pemerintahan</li> <li>• Penyiapan dan penyempurnaan berbagai</li> </ul>	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan teknis, fungsional, struktural dan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur melalui perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan teknis, fungsional, struktural dan penyediaan pelatihan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

				<p>peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan profesionalisme PNS melalui penyempurnaan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin</li> <li>• Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur melalui perencanaan dan pengembangan pendidikan latihan teknis, fungsional, struktural dan pendidikan pelatihan kepemimpinan.</li> <li>• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional, termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai kebutuhan</li> </ul>			
8	<b>Pengembangan kawasan unggulan</b>	Peningkatan produktivitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktifitas industri</li> <li>• Pemanfaatan sumberdaya lokal bagi industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kompetensi SDM</li> <li>• peningkatan kualitas SDM lokal yang meliputi softskill dan hardskill</li> <li>• Insentif bagi industri pengguna banyak tenaga kerja</li> <li>• insentif dan fasilitas bagi industri berdasarkan konten input lokal dan tingkat penggunaan tenaga kerja lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi bentuk pelatihan untuk peningkatan skill tenaga kerja industri</li> <li>• Rekomendasi sistem yang memberikan ketenagaan dalam bekerja dan semangat untuk selalu meningkatkan kinerja</li> <li>• Rekomendasi jenis hard skill yang dibutuhkan sebagai penunjang</li> <li>• Rekomendasi jenis soft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain bentuk pelatihan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja industri</li> <li>• Desain bentuk pelatihan untuk peningkatan soft skill tenaga kerja industri</li> <li>• Desain sistem yang memberikan kepastian dan ketenangan bagi pekerja dalam menjalani tugasnya</li> <li>• Desain reward and</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

					<p>skill yang dibutuhkan sebagai penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi bentuk bentuk insentif bagi industri yang menyerap banyak tenaga kerja lokal</li> <li>• Rekomendasi bentuk bentuk insentif bagi industri yang menggunakan banyak input lokal</li> <li>• Rekomendasi teknologi yang optimal bagi pengguna input lokal secara efisien dan berdaya saing</li> </ul>	<p>punishment yang proporsional sebagai sistem kompetisi internal perusahaan / industri yang sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain bentuk peningkatan hard-skill sumberdaya manusia lokal agar lebih mampu diserap sektor industri</li> <li>• Desain bentuk peningkatan softskill sumberdaya manusia yang terkait kebutuhan sektor industri</li> <li>• Desain bentuk-bentuk insentif dan berbagai prasyarat untuk mendapatkannya</li> <li>• Desain bentuk bentuk insentif dan berbagai prasyarat untuk mendapatkannya</li> <li>• Pilihan pilihan teknologi yang optimal bagi penggunaan input lokal secara efisien dan berdaya saing</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	---	--

**Tabel 4.4** Prioritas Bidang P2M Ekonomi dan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Bidang	Tema	Sub Tema	Tujuan	Sasaran	Indikator	Fakultas/ Unit Kerja/ Jurusan
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Pengembangan pendidikan</b>	Pengembangan pendidikan dan potensi wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau</li> <li>• Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan berd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis potensi-potensi ekonomi di wilayah kabupaten ..</li> <li>• Analisis model-model pendidikan yang menunjang pengembangan perekonomian di berbagai wilayah.</li> <li>• Analisis model pendidikan yang mampu menunjang agronomi</li> <li>• Analisis model pendidikan yang mampu menunjang agroindustri</li> <li>• Analisis model pendidikan yang mampu menunjang pengembangan perikanan.</li> <li>• Analisis model pendidikan yang menunjang pengembangan home industry</li> <li>• Analisis model pendidikan dasar 9 tahun.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
2	<b>Peningkatan kesehatan masyarakat</b>	Pengembnagan dan peningkatan kualitas lingkungan yang sehat bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan lingkungan sehat</li> <li>• Peningkatan tenaga kesehatan dalam hal sanitarian Puskesmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadan sarana air bersih bagi masyarakat, terutama penduduk miskin, yang bermukim diwilayah sulit air</li> <li>• Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis komonitas yang berpihak kepada masyarakat miskin,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat</li> <li>• Peningkatan peran tenaga sanitarian Puskesmas dalam pembinaan sarana kesehatan lingkungan</li> <li>• Meningkatkan kelayakan rumah tinggal penduduk, terutama keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan kesehatan bagi masyarakat.</li> <li>• Meningkatnya jumlah MCK bagi masyarakat miskin.</li> <li>• Meningkatnya jumlah rumah layak tinggal</li> <li>• Meningkatnya jumlah sanitasi umum</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi</li> </ul>

				<p>serta memberdayakan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air melalui swa-organisasi dan swa-kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran tenaga sanitarian Puskesmas dalam pembinaan sarana kesehatan lingkungan</li> <li>• Peningkatan kelayakan dan kesehatan rumah tinggal penduduk, terutama keluarga miskin serta pengadaan sarana sanitasi dasar</li> <li>• Pembinaan sarana lingkungan yang meliputi sanitasi perumahan, sanitasi tempat-tempat umum, sanitasi pengelolaan makanan, sanitasi pengelolaan pestisida, dan pengembangan wilayah sehat</li> </ul>	<p>miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana sanitasi dasar</li> </ul>		<p>Visual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik</li> </ul>
--	--	--	--	---	---	--	--

3	<b>Penanggulangan kemiskinan</b>	Pengurangan jumlah masyarakat yang miskin dengan pembangunan daerah dan perluasan lapangan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan dan penempatan kerja</li> <li>• Pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan lapangan kerja</li> <li>• Pembentukan tenaga kerja mandiri</li> <li>• Pengembangan produk unggulan spesifik dan kompetitif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja</li> <li>• Dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja</li> <li>• Penempatan tenaga kerja antar daerah melalui transmigrasi</li> <li>• Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan</li> <li>• Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia dan keselamatan serta kesehatan kerja</li> <li>• Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama</li> <li>• Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerjaan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan lapangan kerja dan menciptakan pengembangan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif dalam upaya menciptakan lapangan kerja.</li> <li>• Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri</li> <li>• Meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas prundingan bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya lapangan kerja bagi pencari pekerjaan</li> <li>• Terbentuknya teanga kerja yang tangguh</li> <li>• Terciptanya pengembangan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
---	----------------------------------	--	--	---	---	--	---

4	<b>Ketahanan pangan daerah</b>	Efisiensi usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi budidaya hemat biaya dan tenaga</li> <li>• Pengembangan teknologi pengurangan kehilangan hasil</li> <li>• Pengembangan teknologi produksi tanpa limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi budidaya tanaman hemat biaya dan tenaga</li> <li>• Pengembangan teknologi budidaya hewan ternak hemat biaya dan tenaga</li> <li>• Pengembangan teknologi budidaya ikan hemat biaya dan tenaga</li> <li>• Pengembangan teknologi untuk mengurangi hasil pada tahap budidaya tanaman, ternak dan ikan</li> <li>• Pengembangan teknologi untuk mengurangi hasil pada tahap panen tanaman dan ikan</li> <li>• Pengembangan teknologi untuk mengurangi hasil pada tahap pasca panen tanaman, hewan ternak dan ikan</li> <li>• Rekomendasi teknologi tanpa limbah untuk tanaman padi jagung</li> </ul>	Berkembangnya teknologi yang digunakan petani sebagai upaya peningkatan hasil produksi tanaman pangan	Terjadinya penurunan biaya budidaya dan peningkatan efisiensi usaha tani berbasis hewan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
5	<b>Daya saing ekonomi</b>	Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktifitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengendalian harga bahan pokok</li> <li>• Pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung produksi dan distribusi perekonomian di daerah</li> <li>• Penguatan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi</li> <li>• Pengembangan sistem kemitraan UMKM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah</li> <li>• Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah</li> <li>• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>



			<p>pemberdayaan UMKM dan koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah</li> </ul>	menengah			
6	<b>Infrastruktur Dasar Berkelanjutan</b>	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana transportasi</li> <li>• Pengembangan prasarana transportasi</li> <li>• Penataan operasi dan pengendalian transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan moda angkutan massal diberbagai daerah</li> <li>• terhadap perkiraan biaya investigasi untuk berbagi mode pengangkutan</li> <li>• terhadap pengaruh ekonomi perluasan infrastruktur pengangkutan laut dan perhitungan secara tepat tingkat investasi untuk pelabuhan</li> <li>• lingkup perubahan perubahan terhadap regulasi ekonomi terhadap pelayaran internasional dan penerbangan internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari adanya regulasi ekonomi yang berdampak negatif terhadap arus barang dan jasa</li> <li>• Mengembangkan mode pengangkutan yang efisien dan efektif</li> </ul>	Terciptanya regulasi ekonomi yang positif dan mede angkutan yang efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
7	<b>Tata Kelola Pemerintahan</b>	Meningkatkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan daya ekonomi dan pembangunan deaerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah dan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi koordinasi, sinkronasi dan evaluasi perekonomian daerah</li> <li>• Fasilitasi koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi produk hasil industri, tata niaga perdagangan, industri, dan investasi</li> <li>• Fasilitasi koordinasi, sinkronasi peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk dan jasa</li> <li>• Fasilitasi koordinasi,</li> </ul>	Memberikan fasilitas koordinasi sinkronasi dan evaluasi perekonomian daerah	Terfasilitasinya kooorsdinasi sinkronasi dan evaluasi perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

				sinkronasi dan evaluasi pengelolaan sumberdaya alam			
8	<b>Pengembangan kawasan unggulan</b>	Meningkatkan pengembnagan kawasan unggulan melalui pengembangan ekonomi kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>tentang pengembangan ekonomi kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Database peluang pengembnagan industri berbasis kekayaan alam di kabupaten .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbnagunnya suatu database kekayaan alam yang menarik untuk pengembangan industri</li> <li>Teridentifikasi infrastruktur pendukung yang vital bagi kebutuhan industri</li> <li>Bentuk promosi investasi dan pengembangan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Database potensi yang lengkap</li> <li>Identifikasi infrastruktur yang paling dibutuhkan untuk industri yang relevan</li> <li>Strategi promosi investasi dan pengembangan industri prosedur dan sasaran promosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekonomi Bisnis</li> <li>Pertanian</li> <li>Pendidikan</li> <li>Sosial Politik</li> <li>Hukum</li> <li>Kedokteran</li> <li>MIPA</li> <li>Sastra dan Budaya</li> <li>Desain Komunikasi Visual</li> <li>Teknik</li> </ul>

**Tabel 4.5** Prioritas Bidang P2M Inovasi dan Pengembangan Iptek

No	Prioritas Bidang	Tema	Sub Tema	Tujuan	Sasaran	Indikator	Fakultas/ Unit Kerja/ Jurusan
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>pengembangan pendidikan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan</li> <li>• Pmerataan pendidikan dasar dan menengah</li> <li>• Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan</li> <li>• Pendidikan multi kultural</li> <li>• Pendidikan keguruan</li> <li>• Pendidikan anak usia dini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penuntasan wajib belajar 9 tahun</li> <li>• Penanggulangan masalah anak putus sekolah</li> <li>• Lulusan SMK yang siap kerja</li> <li>• Model dan muatan kurikulum yang sesuai</li> <li>• Tersedianya guru berkualifikasi dan profesional.</li> <li>• Tersedianya guru yang menjadi pembelajar sepanjang hayat</li> <li>• Muatan dan materi kurikulum lokal</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
2	<b>Peningkatan kesehatan masyarakat</b>	Peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan gizi masyarakat</li> <li>• Pencegahan dan pemberantasan penyakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kekurangan gizi mikro lainnya terutama dikalangan penduduk miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan penanggulangan kurang gizi</li> <li>• Meningkatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya keseimbangan gizi</li> </ul>	Meningkatnya angka gizi buruk di masyarakat meningkatnya pengetahuan tentang wabah tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pendidikan masyarakat tentang keseimbangan asupan dan kebutuhan gizi pada ibu hamil</li> <li>• Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko</li> <li>• Peningkatan pelayanan imunisasi.</li> <li>• Penemuan dan tatalaksana penderita</li> <li>• Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah</li> <li>• Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pencegahan faktor resiko</li> <li>• Meningkatkan penanggulangan wabah</li> </ul>		<p>Komunikasi Visual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik</li> </ul>
3	<b>Penanggulangan kemiskinan</b>	Peningkatan kinerja tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja</li> <li>• Penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi</li> <li>• Peningkatan dan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja</li> <li>• Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja, serta peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan standart kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja</li> <li>• Menciptakan pelatihan kerja berbasis kompetensi</li> <li>• Menciptakan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja</li> <li>• Meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya standart kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja</li> <li>• Terciptanya pelatihan kerja berbasis kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

				<p>profesionalisme tenaga kepelatihan dan infrastruktur pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja</li> <li>• Pendidikan dan latihan bagi calon tenaga kerja migran</li> </ul>	<p>relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja</li> </ul>		
4	<b>Ketahanan pangan daerah</b>	Peningkatan produksi dengan pengembangan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi penyedia bibit dan benih</li> <li>• Pengembangan teknologi produksi cocok bagi kondisi dan kebutuhan petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi bibit/ benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan</li> <li>• Pengembangan teknologi pengadaan bibit/ hewan ternak</li> <li>• Pengembangan teknologi pengadaan bibit ikan</li> <li>• Pengembangan teknologi budidaya pertanian (termasuk peternakan dan perikanan ) yang dapat diadopsi petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi teknologi pengadaan bibit, benih dan hewan ternak serta bibit iakn sehingga dapat meningkatkan hasil produksi petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya teknologi pengadaan bibit dan benih yang dapat dikerjakan petani</li> <li>• Petani tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bibit dan benih tanaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>
5	<b>Daya Saing Ekonomi</b>	Meningkatkan pengembangan sektor industri untuk mendukung sektor unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan</li> <li>• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata</li> <li>• Perluasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan destinasi wisata</li> <li>• Kajian mengenai kerjasama yang dapat meningkatkan pemasaran wisata</li> <li>• mengenai peningkatan kerjasama antara industri kecil dan menengah</li> </ul>	Meningkatnya kerjasama antara berbagai pihak, baik itu industri kecil maupun pemasaran	Terciptanya hubungan yang positif dari berbagai bidang yang menjalin kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi</li> </ul>

			<p>jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan</li> <li>• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata</li> </ul>				<p>Visual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik</li> </ul>
6	<b>Infrastruktur Dasar Berkelanjutan</b>	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan air baku</li> <li>• Tata kelola air baku</li> <li>• Pengurangan daya rusak air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kondisi infrastruktur untuk penyediaan dan pengolahan air baku</li> <li>• Pemeliharaan infrastruktur penyediaan air baku</li> <li>• Penyusunan sistem pemeliharaan infrastruktur pengolahan dan pengolahan serta pemnataan kualitas aira baku</li> <li>• Penyusunan system untuk pemeliharaan infrastruktur jarinagn distribusi air bersih</li> <li>• Studi investigasi dan desain infrsaturuktur</li> </ul>	Teridentifikasinya infrastruktur untuk penyediaan air baku bagi masyarakat	Tersedianya air baku yang bersih bagi masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

				<p>penyediaan air baku yang berwawasan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan potensi air baku dan upaya konservasi di kabupaten .</li> <li>• Pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air</li> <li>• Penyusunan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin</li> <li>• Pemanfaatan stasiun cuaca untuk mitigasi banjir</li> <li>• Pengembangan sistem peringatan dini terhadap banjir</li> </ul>			
7	<b>Tata Kelola Pemerintahan</b>	Meningkatkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik sebagai upaya inovasi IPTEK dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>• Penbingkataka n kerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pengembangan serta kebijakan pembangunan daerah</li> <li>• Pengutan kelembagaan penelitian dan pengembangan</li> <li>• Pengembangan data pendukung dan dokumentasi hasil dan pengembangan</li> <li>• Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/ kota provinsi</li> </ul>	Meningkatkan dan mengembangkan, setta kebijakan pembangunan dan penguatan kelembagaan dan pengembangan	Meningkatnya dan mengembangkan, serta kebijakan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>

				<p>dengan kabupaten /kota, antar provinsi, provinsi dengan badan / instansi sektoral, serta kerjasama luar negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kerjasama daerah</li> <li>• Fasilitas penyelesaian kerjasama antar daerah</li> </ul>			
8	<b>Pengembangan kawasan unggulan</b>	Pengembnagan kawasan unggulan melalui iptek dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan destinasi wisata</li> <li>• Peningkatan pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata</li> <li>• Pengembangan investasi wisata</li> <li>• Pengembangan teknologi sistem informasi pariwisata</li> <li>• Pengembangan promosi</li> <li>• Pengembangan strategi pro-poor tourism</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi potensi ODTW disetiap daerah untuk dikembangkan ODTW unggulan</li> <li>• Pengembangan produk wisata baru berbasis kebudayaan lokal melengkapi objek wisata fisik yang sudah ada</li> <li>• Pengembangan ekowisata/ agrowisata diintegrasikan dengan pengembangan kawasan agropolitan</li> <li>• Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pariwisata</li> <li>• Pembnagunan dan pengembangan infrastruktur keapriwisataan</li> <li>• Penataan ruang wilayah pariwisata</li> <li>• Fasilitasi pengembangan dan penumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terintegrasinya potensi ODTW unggulan di daerah</li> <li>• Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata daerah</li> <li>• Rekomendasi pengembangan ekowisata /agrowisata yang terintegrasi pengembangan kawasan agropolitan</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata</li> <li>• Memberikan jaminan kepastian hukum bagi investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terberdayakannya masyarakat beserta potensi wisata budaya lokal</li> <li>• Berkembangnya ekowisata dan agrowisata di kawasan agropolitan</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata</li> <li>• Meningkatnya kepastian hukum bagi investasi pembangunan dan pengembnagan kepariwisataan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Bisnis</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Hukum</li> <li>• Kedokteran</li> <li>• MIPA</li> <li>• Sastra dan Budaya</li> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Teknik</li> </ul>



				<p>investasi industri pariwisata melalui pemberian insentif bagi investor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dukungan regulasi yang kondusif bagi investasi di bidang sarana dan prsarana pendukung pariwisata, serta pengembangan ODTW</li> <li>• Pengembangan konsep strategi pembnagunan pariwisata terintegritas dengan penanggulangan kemiskinan</li> <li>• Peningkatkan peluang keterlibatan masyarakat miskin dalam bisnis pariwisata lokal</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pengembangan sistem informasi dan promosi pariwisata</li> <li>• Pengembangan potensi pasar pariwisata</li> <li>• Pengembangan citra potitif pariwisata daerah</li> <li>• Pengembangan strategi promosi yang efektif dan efisien</li> </ul>	<p>pembangunan dan pengembangan kepariwisataan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4.4.Indikator Program Kegiatan P2M

**Tabel 4.6.** Indikator Sasaran P2M Dan Capaian Tahun 2015-2021

Indikator Kinerja Utama	Kondisi awal (2015)	Capaian tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset	397						
Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen	1:6						
Jumlah mitra	305						
Jumlah pengabdian unggulan Pusat Studi	5						
Jumlah kegiatan pelatihan yang dikelola Pusat tiap tahun.	10						
KKN-PPM	100						

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Strategi Bisnis Pengabdian kepada Masyarakat (RSB-P2M) tahun 2016 bertujuan memberikan arah pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berbasis riset yang dilaksanakan secara kelembagaan (Fakultas/ProgDi/Jurusan/Pusat Studi) maupun secara individu (para peneliti dan pengabdian) di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Universitas Sebelas Maret bertekad untuk terus menjamin keberlanjutan program penelitian unggulan perguruan tinggi yang tertuang di dalam dokumen RENSTRA, dengan dukungan dari berbagai *stakeholder* baik dari dalam maupun luar lingkungan UNS. Dukungan tersebut dapat berwujud berupa kebijakan, sarana prasarana serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan UNS.

Semoga dengan adanya RSB-P2M ini dapat menjadi panduan para dosen/peneliti di UNS agar produk-produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan lebih berdaya guna, baik bagi masyarakat, industri, dan bagi Universitas Sebelas Maret dalam upaya menjadi *World Class University*.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada tim penyusun Rencana Strategi Bisnis Pengabdian kepada Masyarakat (RSB-P2M) LPPM-UNS.